

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PESANTREN BERBASIS
GOOD GOVERNANCE DI PPI ASHRI JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Fitriyani Agustin
J E 211105030003 R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2025**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PESANTREN
BERBASIS *GOOD GOVERNANCE* DI PPI ASHRI JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Fitriyani Agustin

NIM. 211105030003



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Agung Parmono, SE, M.Si

NIP. 197512162009121002

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PESANTREN BERBASIS
GOOD GOVERNANCE DI PPI ASHRI JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S Ak)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Februari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Sofiah, M.E.
NIP. 199105152019032005

Mutmainnah, M.E.
NIP. 199506302022032004

Anggota:

1. Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M. Akun. ()
2. Agung Parmono, S.E., M.Si. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ji. Uhaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانْتُمْ بَدِينِ الْإِجَارِ مُسَمِّهِ فَارْتَبِطُوا بِمَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْإِجَارِ وَلَا تَأْبُوا
كَاتِبًا أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ فليَمْلَأْ لَهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرِيَّ وَلَا يُبَاطِلَ الشُّهَادَةَ إِذَا مَا دَعَا وَلَا تَسِيْمَا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ أَلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تَدْبَرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهُمَا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Surat A-Baqarah Ayat 282).*

* Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Kementerian Agama RI. 2019).

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak tercinta (Abd Rasid) dan Ibu tercinta (Yulistiyani) yang senantiasa telah memberikan dukungan secara penuh, dukungan berupa doa tanpa henti dan motivasi maupun dukungan materi untuk terus melanjutkan pendidikan S1.
2. Adik dan nenek saya tersayang (Moh Teguh Abdurrahim dan Sumina) yang selalu memberikan doa dan mendukung saya dengan memberikan semangat untuk berusaha.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal.
4. Seluruh keluarga PPI ASHRI yang ridho dan barokahnya selalu saya harapkan.
5. *I wanna thank me* karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini semoga pencapaian ini membuka pintu kesuksesan kedepannya.

6. Teman-teman seperjuangan dan teman kelas Akuntansi Syariah 2021 terlebih khusus Akuntansi Syariah 3 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
7. Almamater kebanggaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli kompeten dibidangnya, sehingga memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.

Terimakasih yang tak terhingga untuk kalian semua bahkan yang tidak tertulis kedalam lembar ini. Dan terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan hingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk progres ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.



ABSTRAK

Fitriyani Agustin, 2025: Penerapan Standar Akuntansi Pesantren Berbasis *Good Governance* Di PPI ASHRI Jember

Kata kunci: Standar Akuntansi Pesantren, *Good Governance*

Standar akuntansi yang digunakan dalam pesantren mengacu pada SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang menjadi dasar bagi Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI). PAP mengatur penyusunan laporan keuangan pesantren, meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Prinsip tata kelola yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan menjadi pedoman dalam menciptakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien. Dalam hal pelaporan keuangan PPI ASHRI hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan itu laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pondok pesantren menciptakan *good governance* melalui laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pesantren?.

Tujuan penelitian untuk menganalisis standar akuntansi pesantren berbasis *good governance* di PPI ASHRI Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis lapangan. Menggunakan teknik observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data dan informasi. yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti ketua majelis, wakil ketua majelis, bendahara pengurus pesantren, santri, dan wali santri.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan standar akuntansi pesantren di PPI ASHRI masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan dan pendidikan. Rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah atau pemerintah untuk mendukung penerapan standar akuntansi berbasis *good governance* secara optimal di pesantren.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Pesantren Berbasis *Good Governance* di PPI ASHRI Jember”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah S.H.I., M. S.I. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik.

6. Bapak Agung Parmono, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
7. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan mendidik yang bermanfaat bagi peneliti serta pelayanan yang baik selama peneliti menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.
8. Ketua Majelis, Pengurus dan Santri PPI ASHRI Jember yang telah mamberikan izin riset, waktu, dan data yang diperlukan sehingga penelitian yang dilakukan peneliti menjadi sebuah skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran, masukan, serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 20 November 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fitriyani Agustin

Nim. 211105030003

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	vi
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xvi
BAB I Pendahuluan	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II Kajian Pustaka	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	24
1. Teori Legitimasi	24
2. Teori Stakeholders.....	27
3. Teori Agency	31

4. Good Governance	33
5. Pengertian Akuntansi	45
6. Pondok Pesantren	50
7. Akuntansi Pondok Pesantren Berdasarkan ISAK 35	54
8. Pentingnya Penerapan Standar Akuntansi Pesantren	60
BAB III Metode Penelitian	64
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	64
C. Subyek Penelitian	65
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Analisis Data	68
F. Keabsahan Data	69
G. Tahap-tahap Penelitian	70
BAB IV Penyajian Data dan Analisis	72
A. Gambaran Obyek Penelitian	72
1. Sejarah Berdirinya PPI ASHRI	72
2. Profil PPI ASHRI	76
3. Visi, Misi, dan Tujuan Pesantren	76
4. Data Kepengurusan PPI ASHRI	77
5. Data Jumlah Santri PPI ASHRI	77
B. Penyajian Data dan Analisis	78
1. Penerapan Standar Akuntansi Pesantren Melalui Penyusunan Laporan Keuangan di PPI ASHRI	79
2. Menciptakan <i>Good Governance</i> melalui	

Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pesantren	88
C. Pembahasan Temuan	103
1. Penerapan Standar Akuntansi Pesantren Melalui Penyusunan Laporan Keuangan di PPI ASHRI	103
2. Menciptakan <i>Good Governance</i> melalui Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pesantren	112
BAB V Penutup	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
Lampiran-lampiran	
1) Matriks Penelitian	
2) Pernyataan Keaslian Penulisan	
3) Pedoman Wawancara	
4) Surat Izin Penelitian	
5) Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6) Jurnal Kegiatan Penelitian	
7) Dokumentasi	
8) Surat Keterangan Plagiasi	
9) Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	
10) Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
4.1 Data Kepengurusan PPI ASHRI.....	77
4.2 Data Jumlah Santri PPI ASHRI.....	77
4.3 Arus Kas Masuk dan Keluar PPI ASHRI.....	91
4.4 Rekomendasi Laporan Posisi Keuangan.....	106
4.5 Rekomendasi laporan Aktivitas.....	107
4.6 Rekomendasi laporan Arus Kas.....	109
4.7 Perbandingan Good Governace dan ICG	118



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Sejarah PPI ASHRI	72
4.2 Bukti Pencatatan keuangan PPI ASHRI.....	82
4.3 Bukti Pencatatan Pengeluaran.....	90



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Standar akuntansi keuangan (SAK) merupakan kerangka dalam prosedur pembuatan, penyusunan, proses pencatatan dan penyajian data data akuntansi dengan tujuan laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh para pengguna. Tidak hanya lembaga keuangan yang berperan dalam pertumbuhan akuntansi syariah, namun sejumlah fitur pengembangan organisasi nirlaba juga ikut berperan penting. Sebuah organisasi yang memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menarik perhatian publik terhadap suatu masalah karena alasan non-komersial dianggap nirlaba dengan ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut didirikan dengan tujuan memberi manfaat bagi masyarakat dan bukan didorong oleh keuntungan finansial.¹

Standar akuntansi yang digunakan dalam pesantren mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI), menjadikan SAK ETAP sebagai referensi utama. PAP mengatur penyusunan laporan keuangan pesantren, yang mencakup: Laporan posisi keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan.

¹ Ikatan Akuntan Indonesia. *Pedoman Akuntansi Pesantren*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. (2018).

Pedoman ini bertujuan untuk membantu pesantren dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Menjelang akhir tahun 2024, IAI dan BI menyelesaikan revisi PAP, yang kini disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP), efektif mulai 1 Januari 2025.²

Saat ini di Indonesia terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam pembentukan lembaga-lembaga organisasi, khususnya pada organisasi-organisasi yang berbentuk yayasan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, sosial, keagamaan, atau pendidikan. Salah satu bentuk organisasi yang berada dibawah yayasan adalah pesantren. Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, mengajarkan akhlak mulia, serta berpegang teguh pada ajaran islam melalui pendidikan, dakwah, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren memiliki sejarah panjang di Indonesia, mulai dari masa sebelum kemerdekaan, masa perjuangan kemerdekaan, hingga era kemerdekaan dan pembangunan. Hingga kini, pesantren tetap berperan penting dalam mendorong kemajuan Indonesia, terutama di sektor pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi. Karena peran signifikan pesantren dalam memajukan bangsa, lembaga ini perlu dikelola dengan baik dan menerapkan manajemen yang

² Ikatan Akuntan Indonesia Pedoman Akuntansi Pesantren (2018).

efektif agar perkembangannya tetap terjaga dan terus memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia.³

Pesantren juga termasuk suatu entitas pelaporan yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan yang tidak mencari laba atau keuntungan. Meski demikian pentingnya mencatat dan menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan organisasi nirlaba keagamaan non pemerintah yang hanya mengedepankan pelayanan pihak eksternal, karena itu sangat dibutuhkan pelaporan keuangan yang baik dan terstandar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya akuntansi baik sebagai sistem pencatatan keuangan maupun sebagai alat akuntabilitas keuangan bagi *stakeholder* yang terkait, termasuk organisasi nirlaba khususnya Pesantren.

Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren, yang dibuktikan dengan adanya 28.194 pondok pesantren pada tahun 2019, diperlukan penguatan dalam manajemen pondok pesantren. Manajemen yang efektif dalam pondok pesantren, salah satunya terkait pengelolaan keuangan, mulai dari perolehan hingga pelaporannya. Karena pondok pesantren berlandaskan amanah, banyak diantaranya yang sistem pencatatan keuangannya masih terbatas pada penerimaan dan pengeluaran saja, dengan pelaporan akhir yang hanya berupa saldo kas.

³ Rusmianto, dan Rima Maulini Rima Maulini. "Desain Sistem Informasi Akuntansi Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Pesantren." *Jutis (Jurnal Teknik Informatika)* 11.1 (2023): 15-22.

Laporan yang sederhana tersebut menyebabkan banyak informasi penting terabaikan, seperti aset yang dimiliki, utang, hingga aset neto, sehingga pondok pesantren tidak dapat secara optimal menganalisis perkembangan dan aspek penting lainnya sebagai dasar untuk laporan dan pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena belum adanya standar akuntansi yang baku sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Praktik akuntansi, terutama di lembaga keagamaan, belum banyak diterapkan. Namun, dengan berkembangnya tata kelola yang baik menuju *good governance*, penerapan akuntansi yang baik menjadi keharusan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada umat dan kepada Allah SWT, serta dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah telah mengeluarkan pedoman akuntansi untuk pondok pesantren agar laporan keuangan menjadi standar bagi seluruh pesantren di Indonesia. Pedoman ini digunakan sebagai panduan dalam pencatatan keuangan pondok pesantren. Untuk standarisasi laporan keuangan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia telah menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren. Standar ini dibuat dengan mempertimbangkan bahwa aset yang dikelola oleh pondok pesantren, terutama yang berupa tanah wakaf permanen, memiliki nilai yang relatif besar.⁴

⁴ Yohani. "Implementasi Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pondok Pesantren." *Neraca* 15.2 (2019)

Good governance atau tata kelola yang baik, merupakan aturan dasar yang harus dimiliki oleh setiap lembaga. Sebagai isu fundamental ditengah masyarakat, penerapan *Good Governance* dianggap penting karena prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat membantu lembaga mencapai sinergi yang bermanfaat. *Good governance* sering dikaitkan hanya dengan kepentingan perusahaan (*Good Corporate Governance*). Namun, pandangan ini kurang tepat, karena tata kelola baik adalah instrument umum yang berlaku untuk semua jenis organisasi. Penerapan *Good Governance* di pondok pesantren sangat penting, mengingat pesantren adalah lembaga nirlaba yang dikelola oleh masyarakat. Pondok pesantren memperoleh dana lembaga pendidikan itu sendiri, pemerintah, masyarakat, dan wali santri. Dana yang masuk ke pesantren sering kali cukup besar, sehingga jika tidak dikelola dengan baik, akuntabilitas pondok pesantren akan dipertanyakan. Oleh karena itu, untuk menjamin kinerja pesantren yang efektif dan efisien, penerapan asas *Good Governance* dalam tata kelola pesantren diperlukan guna meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak yang berkepentingan.⁵

Standar yang digunakan merupakan pedoman akuntansi pesantren yang sudah sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK. Peneliti menemukan pada saat di lapangan transaksi yang terjadi di pesantren modern saat ini dapat disebut transaksi yang cukup besar, sehingga diperlukan untuk membuat atau menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi

⁵ Huzila, Zia. "Adopsi Good Governance Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa". *Diss. Universitas Wiraraja*, 2019.

keuangan pesantren yang memiliki tujuan guna mengimplementasikan pedoman tersebut pada situasi aktual pesantren. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan pada Pesantren yaitu untuk menyediakan informasi kepada *stakeholder* mengenai kondisi keuangan, aliran kas, kinerja, dan hal-hal lain yang dapat digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Pondok Pesantren Islam Ash-Shiddiqi Putri (PPI ASHRI) Jember merupakan lembaga pendidikan agama Islam khusus putri yang berada di tengah-tengah kota Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pesantren ini mengutamakan pengajaran agama Islam, mencakup Al-Qur'an, hadist, fiqih, tauhid, serta berbagai ilmu agama lainnya. Sebagai lembaga yang berbasis agama, PPI ASHRI memainkan peran penting dalam membentuk karakter santri berdasarkan nilai-nilai moral dan etika sesuai dengan ajaran islam. Selain memberikan pendidikan agama, pesantren ini juga mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, meliputi kegiatan ibadah, ngaji kitab, dan pengembangan akhlak. PPI ASHRI ini juga ingin menciptakan kyai perempuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan agama dan pendidikan di lingkungan pesantren dan masyarakat luas untuk mengajarkan nilai-nilai islam dan berkontribusi penyebaran dakwah. Karena dengan adanya kyai perempuan ini, diharapkan tercipta keseimbangan peran gender dalam pendidikan agama dan kepemimpinan di dalam Islam. Di samping itu juga pesantren ini memiliki program pendidikan formal seperti madrasah atau pendidikan

sekolah umum yang mengikuti kurikulum nasional. Sehingga santri memperoleh pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum.

Dalam hal pelaporan keuangan, PPI ASHRI hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran. Namun, laporan keuangan yang disajikan masih dianggap belum memadai dan belum lengkap. Meskipun PPI ASHRI tidak berorientasi pada keuntungan, agar kinerja tergambarkan dengan jelas, diperlukan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi pesantren yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian laporan keuangan yang disajikan berdasarkan PAP, serta mengidentifikasi faktor-faktor dan kendala yang dihadapi oleh PPI ASHRI dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PAP.⁶

Penyusunan laporan keuangan di PPI ASHRI ini yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran yang masih manual dikarenakan kurangnya pengetahuan pengurus atau staf pengelola keuangan pesantren serta kurangnya sumber daya yang tersedia, dengan jumlah santri yang cukup banyak sekitar 501 santri sehingga pencatatan dan penyusunan laporan keuangannya yang hanya memiliki satu orang bendahara dan juga masih sangat minim pengetahuan tentang standar akuntansi pesantren untuk mengelola keuangan mengenai standar akuntansi yang berlaku. Dengan adanya keterbatasan ini mengakibatkan laporan keuangan yang

⁶ Soleha, Nurhayati, dkk. "Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren Di Kabupaten Dan Kota Serang." *Jurnal Abdimas Indonesia* 2.4 (2022)

dihasilkan menjadi tidak komprehensif, dan sulit untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kesehatan keuangan pesantren. Tanpa laporan yang lengkap, manajemen dan pihak-pihak terkait tidak dapat mengevaluasi dengan tepat kinerja keuangan atau membuat keputusan yang berbasis data yang valid.

Masalah ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan dan pendampingan yang memadai dalam penerapan standar akuntansi yang relevan, seperti PAP, sehingga menurunnya kepercayaan dari pihak luar terhadap manajemen dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh pondok pesantren. Oleh karena itu, penting bagi pengurus atau staf keuangan pesantren untuk memahami dan menjalankan kewajiban pelaporan keuangan dengan benar. Hal ini akan menjaga integritas dan keberlanjutan organisasi, serta memungkinkan pondok pesantren memperoleh kepercayaan dan dukungan yang lebih luas dari masyarakat dan pihak luar.⁷Rekomendasi penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.⁸

Pesantren yang baik dapat dilihat dari laporan keuangan yang akuntabilitas dan sesuai dengan standar Pencatatan keuangan dalam Pesantren masih menggunakan metode manual atau sederhana, tidak banyak pesantren yang menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan

⁷ Windasari, Ihsanul. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam." *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1.1 (2024): 10-25.

⁸ Riswaningtia, Aren Riyan. "Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)(Studi Kasus pada Laporan Keuangan Swalayan 1 UD Assyarif Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Kabupaten Situbondo)". *Diss. Universitas Jember*, 2019.

sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pesantren yaitu mempermudah mengetahui informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas untuk kegiatan operasionalnya. Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan dan mengetahui lebih lanjut bagaimana tata kelola yang baik berasaskan *Good Governance* dapat dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pesantren dengan judul “**Penerapan Standar Akuntansi Pesantren Berbasis *Good Governance* di PPI ASHRI Jember**”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian dan bagian ini menyebutkan semua fokus penelitian yang akan dibahas selama penelitian. Fokus penelitian disajikan dalam bentuk pertanyaan dengan susunan yang ringkas, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan.⁹

Bagaimana Pondok Pesantren menciptakan *Good Governance* melalui laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah panduan yang menggambarkan arah yang ingin dicapai dalam proses penelitian. Tujuan ini harus selaras dengan

⁹ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selain itu, tujuan penelitian memiliki hubungan erat dengan rumusan masalah yang dirancang untuk mencapai hasil dari penelitian tersebut.¹⁰

Untuk mengetahui bagaimana pondok pesantren dapat menciptakan *Good Governance* yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pesantren.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu akuntansi lembaga keagamaan yang ingin mengetahui tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan dalam Pesantren berbasis *good governance* (tata kelola yang baik) apakah sesuai dengan standar akuntansi pesantren.
- b. Sebagai perbandingan antara teori yang didapat pada bangku kuliah dengan penerapannya yang sebenarnya di lapangan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

¹⁰ Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Tulis Ilmian UIN KHAS Jember, "pedoman penulisan karya ilmiah" (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dibuat untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam aplikasi ilmu yang diperoleh pada bangku kuliah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman baru untuk mengetahui perbandingan teori dan penerapan yang sebenarnya di lapangan.

b. Bagi Pesantren

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyajian dan pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman Akuntansi Pesantren, sehingga membantu perkembangan pelaporan keuangannya dan lembaga yang terkait.

c. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai sumber referensi dan tambahan pengetahuan di dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis.

E. Definisi Istilah

1. Akuntansi Pesantren

Akuntansi pondok pesantren yang secara umum bisa dikenal dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pesantren yaitu agar mendapatkan hasil data keuangan dengan cara mempertimbangkan karakteristik serta sifat pondok pesantren tersebut yang dinyatakan dalam IAI dengan BI pada Tahun 2018. Upaya pemberdayaan perekonomian di pondok pesantren agar pondok pesantren dapat

menyusun laporan keuangan secara benar merupakan tujuan dari adanya disusunnya pedoman akuntansi pesantren. Bagi pondok pesantren yang masih belum terikat dalam menyusun laporan keuangan maka dari itu dilakukannya arahan dalam penyusunan pedoman akuntansi pesantren secara benar yang dapat diterapkan pada Yayasan pondok pesantren. Yayasan pondok pesantren yang memiliki bada usaha yang mempunyai regulasi sendiri seperti perseroan terbatas maka dari itu tidak boleh diterapkannya pedoman akuntansi pesantren.¹¹

Standar akuntansi pesantren ini mencakup prosedur pencatatan, pelaporan, dan penyajian data keuangan pesantren secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui. Standar yang berlaku untuk pesantren bisa merujuk pedoman akuntansi pesantren yang telah dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia.¹²

2. *Good Governance*

Good governance di pesantren merujuk pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan organisasi pesantren, baik dari segi keuangan, sumber daya, maupun pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi,

¹¹ Muhamad Rozaidin, Hendri Hermawan Adinugraha, "Penerapan Akuntansi Pondok Pesantren (Studi pada Koperasi Pondok Pesantren Al Hasyimi Kabupaten Pekalongan)," *Ekonomika SYARIAH: Journal of Economic Studies* 4, no. 2 (2020)

¹² Alfie, Atieq Amjadalah, dan Prasetyo Aji Triyoga. "Analisis Laporan Keuangan Pondok Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18.2 (2023).

akuntabilitas Dengan penerapan tata kelola yang baik, pesantren diharapkan dapat menjaga keinginan, kepercayaan masyarakat, serta mencapai visi dan misinya secara efektif. *Good governance* mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap pengelolaan organisasi.

3. PPI ASHRI Jember

PPI ASHRI merupakan singkatan dari pondok Pesantren Islam Ash-Shiddiqi Putri yang berada di Jember, Jawa Timur. Pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam khusus putri yang berperan dalam memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum, serta berkomitmen mencetak kyai perempuan. Dalam skripsi ini, PPI ASHRI Jember dijadikan sebagai studi kasus untuk menerapkan standar akuntansi pesantren berbasis *Good Governance*.

Jadi, secara keseluruhan judul ini merujuk pada penelitian mengenai bagaimana penerapan standar akuntansi pesantren yang mengedepankan tata kelola yang baik di PPI Jember untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskriptif alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan penutup.

Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹³

Bab I pendahuluan, mencakup beberapa aspek, yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah dari penerapan standar akuntansi pesantren berbasis *good governance* (tata kelola yang baik).

Bab II, menjelaskan tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pesantren berbasis *good governance* di PPI Ashri Jember.

Bab III, membahas mengenai pendekatan penelitian dan jenis penelitian, subyek, dan objek penelitian, sumber data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

Bab IV, membahas tentang analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menguraikan tentang gambaran umum penelitian dilengkapi dengan profil PPI Ashri Jember.

Bab V, membahas tentang kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh bab pertama, sedangkan saran diberikan sebagai masukan untuk lokasi penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya dan bab ini berfungsi sebagai bentuk penyampaian hasil yang ditemukan.

¹³ Tim Penyusun “*pedoman penulisan karya Ilmiah*” ,93.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mempelajari praktik akuntansi dan *good governance* di beberapa pondok pesantren.

- a. Faturahman, Atar Satria Fikri, dan Ferry Saputra Tanjung (2024) melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Daya Saing Pesantren, Kontribusi *Good Corporate Governance* dan Informasi Akuntansi Melalui Kinerja Organisasi Pesantren di Kota Jambi”. Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* berkontribusi positif signifikan terhadap daya saing pesantren, sedangkan informasi akuntansi berkontribusi positif tetapi tidak signifikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kinerja organisasi mampu memoderasi kontribusi *Good Corporate Governance* dan informasi akuntansi terhadap daya saing pesantren, menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dan informasi akuntansi yang andal diperlukan untuk mendukung daya saing institusi pendidikan Islam ditengah persaingan global.¹⁴
- b. Daris Iqbal Chysara dan Mulyawan Safwandy Nugraha (2024) melakukan penelitian pada Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa di Anjarsari, Bandung dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Keuangan

¹⁴ Faturahman, F. "Peningkatan Daya Saing Pesantren; Kontribusi *Good Corporate Governance* Dan Informasi Akuntansi Melalui Kinerja Organisasi Pesantren Di Kota Jambi." *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah* 7.1 (2024).

Melalui Penerapan Good Governance Pada Pondok Pesantren”. Hasil dari penelitian ini pengelolaan keuangan di pondok pesantren menunjukkan focus yang cukup beragam, terutama dalam hal penerapan prinsip *Good Governance*. Meskipun ada usaha menjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran, terdapat kebutuhan signifikan untuk memperkuat perencanaan anggaran dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Studi tersebut menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan Islam, dimana penerapan tata kelola yang baik menjadi solusi utama dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi relevansi penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu manajemen keuangan yang efektif.¹⁵

- c. Reni Nur Safitri dan Maulida Narasati (2023) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) Pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya”. Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun yayasan tersebut telah memenuhi beberapa indikator akuntabilitas seperti penerapan SOP dan sistem pengawasan, mereka belum sepenuhnya transparan. Misalnya, akses masyarakat terhadap transparansi anggaran dan

¹⁵ Daris Iqbal Chysara dan Mulyawan Safwandy Nugraha, "Efektivitas Pengelolaan Keuangan melalui Penerapan *Good Governance* pada Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung," *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, vol. 3, no. 1, 2024.

keterlibatan dalam keputusan anggaran masih minim. ISAK 35, yang merupakan standar laporan keuangan untuk entitas nirlaba, belum sepenuhnya diterapkan, meskipun laporan keuangan yayasan tersebut dapat disesuaikan dengan standar ini dimasa depan.¹⁶

- d. Siti Qomala Khayati (2023) melakukan penelitian dengan judul “Transparansi Keuangan Berbasis *Good Governance* di Pondok Pesantren Al Multazam Husnul Khatimah Kuningan Jawa Barat”. Dari hasil penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan transparansi berbasis *Good Governance* dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan *stakeholder*; termasuk santri, orang tua, dan donator. Pondok pesantren yang menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan mampu mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran.¹⁷
- e. Himmatul Ulyah dan Rizki (2023) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Menuju *Good Islamic Boarding School Governance*”. Dari hasil penelitian ini fokusnya adalah bagaimana pedoman akuntansi yang sesuai dengan standar keuangan syariah dapat membantu pesantren mencapai *Good Islamic Boarding School Governance*. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sebagai bagian

¹⁶ Safitri, Reni Nur, dan Maulidah Narasti. "Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 4.2 (2023).

¹⁷ Siti Qomala Khayati. "Transparansi Keuangan Berbasis *Good Governance* di Pondok Pesantren Al Multazam Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3.2 (2023).

dari tata kelola pesantren. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa implementasi pedoman akuntansi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan donator, serta mendorong efisiensi operasional pesantren. Penelitian yang serupa telah dilakukan pada pondok pesantren lain di Indonesia, yang juga menemukan bahwa penerapan akuntansi syariah secara efektif berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik, meningkatkan kinerja manajemen, serta mengurangi potensi terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan pesantren.¹⁸

- f. Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly (2023) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pesantren Berdasarkan ISAK 35 pada Pondok Pesantren Modern I’aanatuth Thalibin Perawang”. Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa laporan keuangan pondok pesantren I’aanatuth Thalibin belum sepenuhnya sesuai dengan ISAK 35. Pencatatan yang dilakukan hanya mencakup uang masuk dan uang keluar secara sederhana, tanpa memperhatikan format laporan yang direkomendasikan, seperti laporan arus kas yang komprehensif.¹⁹
- g. Muhammad syukri dan Syariah Massuki fitri (2023) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Al-Muthmainnah Berdasarkan Pedoman Akuntansi

¹⁸ Ulyah, Himmatul, dan Rizki. "Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Menuju *Good Islamic Boarding School Governance*." *Indonesian Journal of Dedication and Educations* 2.2 (2023): 1-10.

¹⁹ Suryadi, Nanda, dkk. "Analisis Penerapan Akuntansi Pesantren Berdasarkan ISAK 35 pada Pondok Pesantren Modern I’aanatuth Thalibiin Perawang." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6.1 (2023).

Pesantren”. Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penyusunan laporan keuangan pesantren tidak sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren. Laporan keuangan pondok pesantren Al-Muthmainnah belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang diatur dalam PSAK 45 untuk entitas nirlaba. Laporan yang disajikan hanya berupa laporan penerimaan dan pembayaran sederhana serta laporan laba rugi, tanpa laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pedoman akuntansi pesantren.²⁰

- h. Yuniep Mujati dan Ella Rohmatillah (2022) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada lembaga pendidikan pesantren studi kasus pada pondok pesantren Hamalatul Qur’an Jombang”. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggungjawab di pondok pesantren Hamalatul Qur’an adalah baik. Sedangkan pada prinsip kemandirian dan prinsip kewajaran atau kesetaraan adalah cukup. Maka disarankan kepada pihak manajemen pondok pesantren Hamalatul Qur’an jombang agar tetap mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance* secara konsisten dan berkesinambungan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggungjawab. Selain itu juga

²⁰ Muhammad Syukri, Syarifah Massuki Fitri, dan Hery Syafhariaawan. "Analisis Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Al-Muthmainnah Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren." *Jurnal Economina* 2.1 (2023): 139-147.

perlu adanya evaluasi secara berkala atas prinsip kemandirian dan prinsip kewajaran atau kesetaraan.²¹

- i. Sahri Yulian dan Arraditya Permana (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisis penerapan laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren menggunakan PSAK no. 45”. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PPM Al-Manar hanya menyusun laporan keuangan berupa catatan kas penerimaan dan pengeluaran bulanan menggunakan metode *single-entry*. Laporan ini tergolong sederhana dan tidak memenuhi komponen laporan keuangan lengkap sesuai Pedoman Akuntansi Pesantren yang mencakup posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.²²
- j. Muhammad Aldi Aihunan (2020), di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang berjudul “Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Yayasan Pondok Pesantren Ilsa Al-Anshor”. Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penyusunan laporan keuangannya masih sederhana dan belum sesuai dengan standar akuntansi pesantren. Hal ini disebabkan oleh kurangnya rincian dalam menggambarkan arus kas, baik untuk operasional, investasi, maupun pembiayaan.²³

²¹ Suaidah, Yuniep Mujati, dan Ella Rohmatillah. "Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Lembaga Pendidikan Pesantren." *Senmakombis: Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Dewantara*. Vol. 6. No. 1. 2022.

²² Sahri, Yulian. "Analisis penerapan laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren menggunakan PSAK no. 45." *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8.2 (2021).

²³ Aihunan, Muhammad Aldi. "Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Peantren (PAP) di Yayasan Pondok Pesantren Islam Al-Anshor Ambon. Diss. IAIN Ambon, 2020.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Faturahma, Atar Satria Fikri, dan Ferry Saputra Tanjung (2024)	Peningkatan Daya Saing Pesantren, Kontribusi <i>Good Corporate Governance</i> dan Informasi Akuntansi Melalui Kinerja Organisasi Pesantren di Kota Jambi	1) Pembahasan terkait tata kelola yang baik 2) Studi pada Pondok Pesantren	1) Tidak ada pembahasan tentang pedoman akuntansi pesantren
2.	Daris Iqbal Chysara dan Mulyawan Safwandy Nugraha (2024)	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Melalui Penerapan <i>Good Governance</i> Pada Pondok Pesantren	1) Pembahasan yang sama menggunakan <i>Good Governance</i> 2) Studi pada Pondok Pesantren	1) Penelitian ini hanya berfokus pada tata kelolanya saja. Tidak membahas bagaimana penerapan standar akuntansi pesantren
3.	Siti Qomala Khayati (2023)	Transparansi Keuangan Berbasis <i>Good Governance</i> di Pondok Pesantren Al Multazam Husnul Khatimah Kuningan Jawa Barat	1) Fokus pada transparansi keuangan 2) Penerapan tata kelola yang baik	1) Fokus utamanya menekankan transparansi keuangan. Sedangkan peneliti penerapan standar akuntansi pesantren.

4.	Himmatul Ulyah dan Rizki (2023)	Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Menuju <i>Good Islamic Boarding School Governance</i>	1) Pedoman akuntansi pesantren 2) Tujuan meningkatkan tata kelola pesantren. 3) Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap pesantren.	1) Judul dan fokus istilah 2) Konteks Institusi
5.	Reni Nur Safitri dan Maulida Narasati (2023)	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) Pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya	1) Mengkaji tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.	1) Fokus utamanya ada pada penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Sedangkan peneliti berfokus pada penerapan standar akuntansi pesantren berbasis <i>good governance</i> .
6.	Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly (2023)	Analisis Penerapan Akuntansi Pesantren Berdasarkan ISAK 35 pada Pondok Pesantren Modern I'aaatuth Thalibin Perawang.	1) Penerapan Akuntansi Pesantren	1) Berbasis <i>good governance</i> 2) Berdasarkan ISAK 35

7.	Muhammad syukri dan Syariah Massuki fitri (2023)	Analisis Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Al-Muthmainnah Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren	1) Pembahasan terkait laporan keuangan yang sesuai dengan standar pedoman akuntansi pesantren. 2) Penelitian kualitatif.	1) Tidak membahas bagaimana tata kelola yang baik di pesantren
8.	Yuniep Mujati dan Ella Rohmatillah (2022)	Implementasi prinsip-prinsip <i>good governance</i> pada lembaga pendidikan pesantren studi kasus pada pondok pesantren Hamalatul Qur'an Jombang	1) Sama-sama mengkaji tentang implementasi/ penerapan <i>good governance</i> 2) Metode penelitian kualitatif	1) Hanya membahas tentang prinsip-prinsip <i>good governance</i> tidak dengan standar akuntansi pesantren
9.	Sahri Yulian dan Arraditya Permana (2021)	Analisis penerapan laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren menggunakan PSAK no. 45	1) Metode penelitian kualitatif 2) Pembahasan mengkaji tentang pedoman akuntansi pesantren.	1) Menggunakan PSAK 45 2) Tidak membahas <i>good governance</i>
10.	Muhammad Aldi Aihunan (2020)	Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Yayasan Pondok	1) Fokus penelitian pada penerapan akuntansi pesantren 2) Objek	1) Berfokus pada analisis penerapan pedoman akuntansi pesantren. Sedangkan

		Pesantren Ilsam Al- Anshor	penelitian pesantren	peneliti ini memiliki pendekatan yang lebih luas, yaitu penerapan akuntansi pesantren berbasis <i>good governance</i> .
--	--	----------------------------------	-------------------------	--

Sumber: Data diolah (penulis)

Skripsi saya mengkaji penerapan standar akuntansi pesantren berbasis *Good Governance* di PPI ASHRI Jember. Berbeda dengan penelitian lain yang membahas tentang penerapan standar akuntansi pada pesantren secara umum, penelitian ini tidak hanya berfokus pada bagaimana pesantren dapat menerapkan standar akuntansi yang sesuai PAP, penelitian ini juga mengkaji terkait *good governance* atau tata kelola yang baik di pesantren. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola keuangan pesantren guna mendukung keberlanjutan operasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren.

B. Kajian Teori

Kajian teori ini membahas tentang berbagai konsep yang digunakan sebagai sudut pandang dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan teori yang lebih luas dan mendetail akan memperkaya wawasan peneliti dalam menelaah masalah yang ingin diselesaikan sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian

kualitatif, teori berperan sebagai perspektif atau alat analisis, bukan untuk diuji.²⁴

1. Teori Legitimasi

Menurut Hadi dalam bukunya menyatakan bahwa legitimasi adalah kondisi psikologis yang menunjukkan dukungan dari individu dan kelompok yang sangat peka terhadap perubahan di lingkungan sekitar, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Definisi ini menandakan bahwa legitimasi mencerminkan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada kepedulian terhadap masyarakat, pemerintah, serta kelompok dan individu dalam komunitas. Sebagai sistem yang mengedepankan kepentingan masyarakat, operasional perusahaan perlu selaras dengan harapan masyarakat.²⁵

Suchman dalam Barkemeyer dalam artikel mendefinisikan legitimasi organisasi sebagai berikut: "Legitimasi adalah persepsi atau asumsi yang umum bahwa tindakan suatu entitas dianggap diinginkan, sesuai, atau tepat dalam suatu sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial".²⁶

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang sering digunakan dalam kajian akuntansi sosial dan lingkungan. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan hubungan

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2021. 46

²⁵ Hadi, Nor. "*Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu." (2011).

²⁶ Suchman, M. C. *Mengelola Legitimasi: Pendekatan Strategis dan Kelembagaan*. Dalam Tinjauan Manajemen.20. (1995).55

mereka dengan masyarakat dan lingkungan dimana mereka beroperasi, karena kelangsungan hidup perusahaan juga bergantung pada penerimaan masyarakat. Dalam konteks ini, teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat, yang menuntut mereka untuk menjalankan aktivitas berdasarkan nilai-nilai keadilan dan norma yang berlaku di masyarakat. Perusahaan juga harus menanggapi berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk melegitimasi tindakan mereka, dengan terus meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas perusahaan sesuai dengan batasan norma sosial yang ada. Dengan demikian, perusahaan semakin memahami pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memperoleh legitimasi publik, yang berdampak positif pada kelangsungan operasional mereka.

Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, perusahaan berupaya memperoleh legitimasi atau pengakuan dari berbagai pihak seperti investor, kreditor, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Untuk mendapatkan pengakuan dari investor, perusahaan terus meningkatkan return saham. Bagi kreditor, perusahaan menunjukkan kemampuannya dalam melunasi hutang. Untuk konsumen, perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan. Pengakuan dari pemerintah diperoleh dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Sedangkan, untuk masyarakat, perusahaan terlibat dalam tanggung jawab sosial. Teori legitimasi juga

menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil.²⁷

2. Teori Stakeholder

Menurut Freeman dalam bukunya menyatakan teori Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki hubungan erat dan langsung mempengaruhi kegiatan perusahaan. Terdapat dua model dalam teori pemangku kepentingan, yaitu kebijakan dan perencanaan bisnis, serta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam manajemen pemangku kepentingan. Fokus utama kepentingan adalah nilai dan peningkatan operasional perusahaan, serta bagaimana perusahaan memenuhi kepentingan mereka.²⁸

Duran dan Davor menyatakan bahwa pemangku kepentingan perusahaan meliputi pemegang saham, karyawan, pemasok, bank, pemerintah dan komunitas, semuanya memiliki peran penting dalam suatu organisasi atau perusahaan.²⁹ Clarkson membagi pemangku kepentingan perusahaan menjadi dua kategori berdasarkan jenis dan karakteristiknya: pemangku kepentingan primer dan sekunder. Pemangku kepentingan primer adalah individu atau kelompok yang keberadaannya esensial bagi kelangsungan hidup perusahaan, seperti pemegang saham, karyawan, investor, pemasok, dan konsumen. Disisi

²⁷ Badjuri, Achmad, Jaeni Jaeni, dan Andi Kartika. "Peran corporate social responsibility sebagai pemoderasi dalam memprediksi profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak di Indonesia: kajian teori legitimasi." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 28.1 (2021)

²⁸ Freeman, RE. *Manajemen Strategis: Pendekatan Pemangku Kepentingan*. Boston: Pitman. (1984). 78

²⁹ Duran, Manuel Balza, dan Davor Radojicic. "Corporate Social Responsibility and Nongovernmental Organizations." (2004). 90

lain, pemangku kepentingan sekunder adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi tidak terlibat dalam transaksi langsung dengan perusahaan dan tidak memiliki peran penting dalam keberlangsungan perusahaan.³⁰

Donaldson dan Preston berpendapat bahwa teori pemangku kepentingan menjelaskan hubungan antara tata kelola dan manajemen perusahaan, serta memberikan rekomendasi mengenai sikap, struktur, dan praktik yang diterapkan secara bersama-sama dapat membentuk suatu filosofi manajemen pemangku kepentingan. Menurut mereka, terdapat tiga aspek dalam teori pemangku kepentingan antara lain:

a. Deskriptif atau Empriris

Aspek ini menjelaskan bahwa teori pemangku kepentingan digunakan untuk memberikan penjelasan tentang karakteristik khusus dan perilaku perusahaan.

b. Instrumental

Aspek ini berfungsi sebagai pelengkap dari data deskriptif yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara pemangku kepentingan perusahaan dan hasil yang diperoleh, seperti profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan.

c. Normatif

Aspek ini menunjukkan bahwa teori pemangku kepentingan bermanfaat untuk memahami fungsi perusahaan, termasuk

³⁰ Clarkson, Max E. "A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance." *Academy of management review* 20.1 (1995).

identifikasi pedoman moral dan filosofi dalam kegiatan operasional dan manajemen perusahaan.³¹

Teori pemangku kepentingan juga menjelaskan adanya hubungan yang erat antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan memiliki sistem manajemen yang efektif untuk mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berpengaruh pada kinerja organisasi.³²

Ghozali dan Chairi dalam buku teori akuntansi berpendapat bahwa teori pemangku kepentingan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan manajerial, mendorong perusahaan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan adalah mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam laporan tahunan, yang memberikan informasi mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan.³³

Pemangku kepentingan bergantung pada perusahaan untuk memuaskan kepentingan mereka sendiri. Dalam literatur, teori ini juga menyoroti bahwa pemangku kepentingan cenderung mengelola

³¹ Donaldson, T., & Preston, LE "Teori Pemangku Kepentingan Perusahaan: Konsep, Bukti, dan Implikasi". *Tinjauan Akademi Manajemen*, 20(1), 65–91. (1995).

³² Setiawan, D., Hapsari R., dan Wibawa, A. "Dampak Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume VIII*. (2018)

³³ Ghozali dan Chariri. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (2007)

hubungan mereka dengan perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri. Adapun faktor-faktor yang menentukan kepuasan pemangku kepentingan, yaitu:

- a. Utilitas terkait dengan barang dan jasa yang diterima,
- b. Utilitas terkait dengan keadilan dan organisasi,
- c. Utilitas terkait dengan persepsi biaya peluang.

Dari argument ini, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pemangku kepentingan bergantung pada bagaimana perusahaan bertindak untuk memenuhi harapan mereka. Kinerja keuangan perusahaan juga menjadi indicator ekonomi yang mencerminkan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingannya.³⁴

Teori *Stakeholder* berpendapat bahwa dalam manajemen bisnis, berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan harus diperhatikan. Pihak-pihak ini mencakup konsumen, pemegang saham, pemasok, masyarakat, dan lingkungan, yang semuanya memiliki peran penting dalam kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya, tetapi juga kepada

³⁴ Fuadah, Nikmatul, dan Fifi Hakimi. "Financial Performance Dan Market Share Pada Bank Umum Syariah Devisa Indonesia: Perspektif Teori Stakeholder." *Jurnal Penelitian IPTEKS* 5.2 (2020).

berbagai pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan operasional perusahaan.³⁵

3. Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling dalam karya mereka yang berjudul *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, Michael C. Jensen dan William H. Meckling menjelaskan bahwa teori agensi berpusat pada hubungan antara prinsipal (pemilik atau pihak yang memberi amanat) dan agen (pihak yang menjalankan amanat). Mereka menarik bahwa dalam hubungan ini, terdapat biaya agensi atau "biaya agensi" yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Misalnya, agen mungkin memiliki insentif untuk bertindak demi kepentingannya sendiri daripada kepentingan utama, yang dapat menyebabkan ketidakefisienan dan kerugian. Untuk mengurangi konflik ini, Jensen dan Meckling memberikan izin penggunaan mekanisme pengawasan, kontrak, atau insentif agar agen berperilaku sesuai dengan keinginan prinsipal. Teori mereka telah menjadi dasar untuk banyak kajian tentang transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi.³⁶

Menurut Eisenhardt dalam artikelnya yang berjudul *Agency Theory: An Assessment and Review*, Kathleen M. Eisenhardt memberikan penilaian komprehensif terhadap teori agensi, tekanan

³⁵ Yuniharto, Juan Daffa Athallah, dkk. "Determinan Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Sektor Industri: Sudut Pandang Teori Stakeholder." *Akuntansi Dewantara* 8.1 (2024).

³⁶ Jensen, MC, & Meckling, WH. "Teori Perusahaan: Perilaku Manajerial, Biaya Agensi dan Struktur Kepemilikan". *Jurnal Ekonomi Keuangan*, 3(4), (1976).

bagaimana teori ini digunakan untuk memahami mekanisme kontrol dan insentif dalam hubungan prinsipal-agen. Eisenhardt menjelaskan bahwa teori agensi cocok diterapkan dalam situasi di mana terdapat perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen, serta ketika pemantauan langsung terhadap agen sulit dilakukan. Ia juga mengidentifikasi dua bentuk kontrol utama untuk mengatasi masalah agensi:

- 1) kontrol berbasis perilaku, yaitu melalui pengawasan langsung dan aturan-aturan, serta
- 2) kontrol berbasis hasil, yang didasarkan pada pemberian insentif berbasis kinerja. Eisenhardt menyoroti bahwa pilihan mekanisme kontrol akan bergantung pada informasi yang tersedia dan tingkat pemesanan dalam hubungan prinsipal-agen.³⁷

Menurut Ross dalam tulisannya *The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem*, Stephen A. Ross menguraikan model teori agensi dengan memperkenalkan konsep-konsep tentang asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Ross menjelaskan bahwa sering kali agen memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal, yang dapat menyebabkan kesulitan prinsipal untuk menyetujui atau memastikan bahwa agen bertindak sesuai keinginan mereka. Untuk mengurangi risiko ini, Ross menyarankan agar

³⁷ Eisenhardt, KM. *Teori Agensi: Penilaian dan Tinjauan*. *Academy of Management Review*, 14(1), (1989). 57–74.

struktur insentif yang baik dapat digunakan agar agen tetap bertindak sejalan dengan prinsipal kepentingan.³⁸

4. *Good Governance*

Menurut UNESCAP, *good governance* memiliki delapan ciri utama, yaitu partisipasi, berorientasi pada konteks, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan inklusivitas, serta kepatuhan pada peraturan hukum. Ciri-cirinya bertujuan untuk memastikan minimalnya korupsi, memperhatikan pandangan kelompok minoritas, dan mendengar suara masyarakat yang rentan dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini juga dirancang agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.³⁹

Istilah *good governance* mulai dikenal luas di Indonesia pada era 1990-an, terutama melalui interaksi dengan Negara-negara donor yang menyoroti perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. *Good governance* dianggap sebagai salah satu kriteria bagi negara-negara yang sukses dalam pembangunan, bahkan menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan optimal. Konsep ini kemudian dipahami sebagai standar bagi organisasi publik, khususnya dalam konteks pemerintahan.

Secara konseptual, “*good*” berarti ”baik” dan “*governance*” berarti “kepemerintahan”. Menurut Lembaga Administrasi Negara

³⁸ Ross, SA. *Teori Ekonomi Agensi: Masalah Prinsipal* . The American Economic Review, 63(2), (1973). 134–139.

³⁹ Nurul Widyawati Islami Rahayu. "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan *Good Governance* di Jember." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 22.2 (2014)..

(LAN), istilah “*good*” dalam *good governance* mengandung dua makna:

- 1) Nilai yang menghargai keinginan rakyat dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional berupa kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- 2) Aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Moenek dkk dalam bukunya menyatakan, *good governance* dapat diartikan secara sederhana sebagai pengelolaan yang baik, yang dimaksud dengan “baik” disini adalah pengelolaan yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip dasar *good governance*. Beberapa kalangan mengartikan *good governance* sebagai prinsip konkret dari demokrasi, yang ditunjang oleh budaya masyarakat sipil untuk menjamin kelanggengan demokrasi.

Bank Dunia mendefinisikan *good governance* dengan menitikberatkan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi demi kepentingan pembangunan masyarakat. Sementara itu, UNDP mengacu pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan Negara. Dalam hal ini, politik tata kelola mencakup proses penyusunan kebijakan, sementara tata kelola ekonomi mencakup pengambilan keputusan yang mendukung aktivitas ekonomi domestik serta interaksi ekonomi secara luas.

Dengan demikian, *good governance* berarti pemerintahan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, agar sumber daya negara benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat serta negara. Secara umum *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan prinsip dasar *good governance*. Berdasarkan definisi Bank Dunia dan UNDP *good governance* adalah manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, mencakup alokasi dana investasi yang bijaksana, pencegahan korupsi, serta disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik yang mendukung.⁴⁰

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi strategi efektif dalam menghadapi tantangan dan risiko. Langkah ini membantu perusahaan meningkatkan nilai dengan membangun citra positif dimata para pemangku kepentingan.⁴¹ Pengertian *good governance* dalam konteks tata kelola perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, serta keadilan dan kesetaraan. Dengan menerapkan *good governance*,

⁴⁰ Moenek, Reydonnyzar, dan Dadang Suwanda. "Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah." (2019).

⁴¹ Mukhtaruddin, M., Ubaidillah, dkk. "Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Firm Value, and Financial Performance as Moderating Variable". *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management* 3.1 (2019).

perusahaan dapat mengurangi risiko konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, sehingga meminimalkan risiko tindakan ekspropriasi.

Mekanisme tata kelola yang baik tidak hanya memastikan perlindungan bagi pemegang saham, tetapi juga membantu perusahaan memperoleh sumber pembiayaan dengan lebih mudah, mengurangi biaya modal, dan meningkatkan daya saing di pasar. *Good governance* menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan, serta membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan.⁴²

Pelaksanaan *good governance* pada pondok pesantren yang melibatkan 5 prinsip utama yang harus diterapkan, yaitu:⁴³

1) Transparansi

Prinsip ini berkaitan dengan keterbukaan dalam menyajikan informasi dan kebijakan. yang dievaluasi adalah bagaimana pesantren dapat menerapkan prinsip keterbukaan melalui indikator yang mengukur informasi yang disampaikan dan kebijakan yang diambil.

⁴² Perdana, Cahya Mahardika Putra, dan Adib Minanurohman. "Tunnelling Behavior: Exploring Corporate Governance and Ownership Structure." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 26.1 (2024): 1-17.

⁴³ Huzila, Zia. *Adopsi Good Governance Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa*. Diss. Universitas Wiraraja, 2019.

2) Akuntabilitas

Pada prinsip akuntabilitas, terdapat dua indikator yang digunakan, yaitu struktur organisasi pesantren dan sistem pengelolaannya. Dengan menerapkan akuntabilitas, pesantren dapat dikelola secara efektif, terukur, dan mampu memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan serta kebutuhan pesantren itu sendiri.

3) Tanggung jawab (*Responsibility*)

Prinsip ini diukur melalui dua indikator, yaitu tanggung jawab pesantren terhadap masyarakat dan lingkungannya *CSR* serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pesantren yang menjalankan prinsip ini harus mematuhi undang-undang dan menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat dan lingkungan.

4) Kemandirian (*Independensi*)

Prinsip *independensi* diukur melalui indikator yang melibatkan pihak internal dan eksternal pesantren. Prinsip ini memastikan bahwa pesantren tidak didominasi atau dipengaruhi oleh pihak lain, baik internal maupun eksternal, sehingga manajemennya dapat berjalan secara mandiri tanpa intervensi.

5) Keadilan (*Fairness*)

Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait dengan pesantren, termasuk

wali santri dan pemangku kepentingan lainnya, dengan menekankan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Tata kelola perusahaan pada dasarnya adalah sebuah sistem yang mencakup input, proses, dan output, serta seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya dalam lingkup hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi, guna mencapai tujuan perusahaan. Sistem tata kelola ini bertujuan untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penerapan strategi perusahaan. Selain itu, tata kelola yang baik juga memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.⁴⁴

Menurut Abu Tapanjeh prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam Islam diterapkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, yang menekankan keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan, serta berorientasi kepada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tertinggi di dunia. Prinsip tata kelola perusahaan dalam Islam lebih menekankan pendekatan yang berorientasi pada

⁴⁴ Ahmad Sodik. "Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung", no. 2 (November 2017).

stakeholders dibandingkan dengan pendekatan berbasis pemegang saham (*shareholders*).⁴⁵

Bhatti dan Bhatti dalam Asrori yang dikutip oleh Nova Rini dalam penelitiannya mendefinisikan *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai upaya untuk merancang sistem di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berbasis hukum syariah. Para pendukung konsep ini meyakini bahwa seluruh aktivitas ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma etika-religius dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa aspek, ICG memiliki kesamaan dengan tata kelola perusahaan konvensional, tetapi perbedaannya terletak pada penerapan kode moral yang berlandaskan ajaran Islam. Model ICG dapat dikembangkan dengan menyelaraskan tujuan hukum syariah dengan konsep tata kelola berbasis *stakeholder*.⁴⁶

Dengan demikian, ICG dapat dikatakan sebagai pengembangan dari konsep GCG yang memiliki tujuan serupa dengan model konvensional, tetapi dengan dasar hukum yang berlandaskan syariah Islam. Najmudin, yang dikutip oleh Endraswati dalam penelitiannya menyatakan bahwa tata kelola perusahaan dalam Islam

⁴⁵ Obid, Siti Normala Sheikh, dan Babak Naysary. "Menuju kerangka teoritis yang komprehensif untuk tata kelola Syariah di lembaga keuangan Islam." *Jurnal Pemasaran Jasa Keuangan* 19.4 (2014).

⁴⁶ Nova Rini, "The implementation of islamic corporate governance (ICG) on sharia banking in Indonesia." *International Journal of Applied Business* 2.1 (2018).

adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai tujuannya dengan melindungi hak dan kepentingan seluruh *stakeholders*. Hal ini dilakukan melalui proses pengambilan keputusan yang berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam, yang berlandaskan prinsip tauhid kepada Allah SWT.⁴⁷

Prinsip-prinsip dalam *Corporate Governance* konvensional pada dasarnya sudah terkandung dalam konsep ICG. Dalam *Corporate Governance konvensional*, terdapat prinsip-prinsip utama seperti transparansi, tanggung jawab (*responsibility*), akuntabilitas, kemandirian (*independensi*) dan keadilan (*fairness*). Dalam perspektif Islam, prinsip transparansi sejalan dengan nilai *shiddiq* (kejujuran), akuntabilitas mencerminkan *shiddiq* dan amanah (kepercayaan), tanggung jawab berkaitan dengan amanah, *tabligh* (komunikasi yang benar), dan *fathanah* (kebijaksanaan), sedangkan keadilan sesuai dengan prinsip *shiddiq* dan amanah.

Namun, meskipun terdapat kesamaan prinsip antara kedua konsep tata kelola tersebut, ICG tidak sepenuhnya identik dengan *Corporate Governance* konvensional. Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan, di mana ICG berlandaskan pada syariah Islam, sementara *Corporate Governance* konvensional lebih didasarkan pada regulasi dan standar bisnis modern. Oleh karena itu,

⁴⁷ Sopia Laila Nugraha, And Hikmah Endraswati. "Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren." *I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance* 8.2 (2022).

implementasi dan penerapannya pun memiliki pendekatan yang berbeda. Jika dibandingkan, prinsip-prinsip yang terdapat dalam ICG lebih komprehensif karena mencakup dimensi moral dan spiritual yang tidak ditemukan dalam model konvensional.⁴⁸

Berikut pembahasan prinsip-prinsip ICG:

1. Shiddiq

Shiddiq berarti jujur, yaitu menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seseorang yang memiliki sifat shiddiq meyakini bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatannya, sehingga ia akan merasa takut untuk berbohong atau berbuat curang. Kejujuran menjadi salah satu prinsip utama dalam ICG, karena mencerminkan integritas dalam setiap aspek bisnis dan manajemen.

Dalam ICG, kejujuran tidak hanya diterapkan dalam perkataan tetapi juga dalam tindakan, sehingga membentuk sistem yang bersih dari korupsi, kecurangan, dan ketidakadilan. Dengan menerapkan nilai *shiddiq*, perusahaan dapat berkembang dengan lebih baik karena operasional bisnis dijalankan secara transparan, adil, dan berintegritas, serta bebas dari praktik manipulasi dan ketidakjujuran.

⁴⁸ Hikmah Endraswati. "Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6.2 (2015).

2. Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan menepati janji. Seseorang yang memiliki sifat amanah akan melaksanakan segala bentuk kesepakatan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Dalam konteks ICG, sikap ini mencerminkan kepercayaan (*trustworthiness*) baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Kepercayaan ini berpengaruh pada berbagai aspek, seperti investasi, pembiayaan, serta citra dan reputasi perusahaan.

Selain itu, amanah juga berkaitan dengan menjaga komitmen. Membentuk komitmen mungkin terasa mudah, namun mempertahankannya memerlukan ketulusan niat, integritas, serta loyalitas yang tinggi. Dalam bisnis, sikap amanah dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan, yang pada akhirnya dapat mendatangkan keberkahan dan meningkatkan kelangsungan usaha.

3. *Tabligh*

Tabligh berarti menyampaikan kebenaran. Dalam Islam, Rasulullah SAW bertugas menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umat manusia, dan kini kewajiban tersebut juga melekat pada setiap Muslim untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan bijaksana. Prinsip ini menekankan pentingnya

menegakkan kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah keburukan (*munkar*).

Dalam konteks ICG, *tabligh* mengajarkan bahwa seorang pemimpin atau pengelola perusahaan harus bersikap bijaksana dalam menyampaikan informasi dengan jujur dan transparan. Prinsip ini juga berkaitan dengan komunikasi yang benar (*qaulan sadidan*).

Dengan menerapkan prinsip *tabligh*, pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan diharapkan mampu menyampaikan informasi yang benar, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang jujur, meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, serta memastikan setiap keputusan bisnis sejalan dengan prinsip keadilan dan kebaikan.

4. *Fathanah*

Fathanah berarti cerdas, yaitu memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual dalam berpikir serta bertindak. Dalam konteks *Corporate Governance*, kecerdasan ini mencerminkan kompetensi seseorang yang dapat diukur melalui prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja, serta pelatihan yang diikuti. Sumber daya manusia yang cerdas sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena dengan kecerdasan tersebut, berbagai tantangan dan permasalahan dapat diatasi, sehingga meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

Dalam ICG, sifat *fathanah* mendukung prinsip-prinsip lainnya seperti *shiddiq* (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), dan *tabligh* (komunikatif). Pemimpin yang memiliki *fathanah* akan lebih bijaksana, memiliki wawasan luas, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, serta dapat mengelola peluang dan menghadapi tantangan dengan baik. Selain itu, kecerdasan ini juga membantu dalam memperbaiki kelemahan organisasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan demikian, *fathanah* tidak hanya mencakup kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan spiritual yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

5. Adil

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal aqidah, syariah, maupun akhlak, sebagai bagian dari konsekuensi keimanan dan untuk mencapai tingkat ketakwaan yang lebih tinggi.

Dalam konteks ICG, prinsip *fairness* (kesetaraan atau keadilan) menjadi aspek penting dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan. Konsep ini bertujuan menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham, karyawan, dan *stakeholder* lainnya.

Jika dikaitkan dengan syariah, konsep keadilan dalam ICG tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek spiritual.

Dengan demikian, penerapan prinsip adil dalam tata kelola perusahaan tidak hanya sebatas keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan etika berdasarkan ajaran Islam. Prinsip ini harus tercermin dalam seluruh aspek *Corporate Governance*, termasuk transparansi, akuntabilitas, serta perlakuan yang setara terhadap seluruh pemangku kepentingan.

5. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah serangkaian konsep dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu entitas ekonomi. Informasi ini sangat penting untuk dilaporkan kepada berbagai pihak yang memerlukannya, seperti manajer perusahaan, pemilik, kreditur, pemerintah, analisa keuangan, dan karyawan. Manajer perusahaan membutuhkan data akuntansi untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dan bisnis. Investor memanfaatkan informasi tersebut untuk memutar potensi keuangan dari investasinya, seperti deviden. Kreditur membutuhkan data keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Pemerintah menggunakan informasi ini untuk keperluan perpajakan dan kepatuhan terhadap peraturan. Analisis keuangan mengandalkan data akuntansi sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi investasi. Sementara itu, karyawan berharap bekerja di perusahaan yang stabil

secara finansial, yang mampu mendukung perkembangan karir dan memberikan penghasilan yang lebih baik. Untuk memahami akuntansi secara menyeluruh, penting untuk terlebih dahulu memahami definisi atau batasan akuntansi itu sendiri.⁴⁹

Akuntansi merupakan proses mencatat, mengelompokkan, dan menyajikan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi dengan metode tertentu, serta menafsirkan hasilnya. Akuntansi merupakan aktivitas yang berfungsi sebagai layanan, dimana transaksi atau peristiwa ekonomi dicatat, diklasifikasikan, dan dilaporkan, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Banyak orang menganggap akuntansi sebagai “*The Language Of Bussiness*” karena sering digunakan dalam dunia usaha untuk mencatat dan menginterpretasikan data ekonomi, baik untuk pemerintah, perusahaan, individu, maupun lembaga lainnya. Menurut komite *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA), akuntansi didefinisikan sebagai seni mencatat, menggolongkan, dan merangkum transaksi serta kejadian-kejadian dalam bentuk moneter, yang umumnya bersifat finansial, serta menafsirkan hasil-hasilnya. Akuntansi telah dikenal dalam dunia bisnis sebagai aktivitas yang berkaitan dengan keuangan. Bahkan, para pedagang Mesir pada zaman

⁴⁹ Agung Parmono, dan Aminatus Zahriyah. "Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember." *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 6.2 (2021).

Romawi kuno telah menggunakan berbagai bahan, seperti batu dan daun, untuk mencatat dan melacak jumlah perdagangan dan keuntungan mereka.⁵⁰

Akuntansi tidak hanya digunakan untuk mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh bisnis dari kegiatan keuangannya, tetapi juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menghitung pengurangan pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh entitas.⁵¹

1. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi merupakan rangkaian langkah dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk periode tertentu. Proses ini diawali dengan adanya transaksi dan berakhir pada penyusunan laporan keuangan di akhir periode.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Proses akuntansi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan data keuangan perusahaan.⁵² Pendekatan terbaik dalam penyusunan laporan keuangan adalah dengan menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu, diikuti oleh laporan perubahan posisi keuangan,

⁵⁰ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta: PT. Raja Rudianto, "Pengantar Akuntansi : Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan", ed. by Suryadi Saat (Jakarta: Erlangga, 2012), p. 16. Grafindo Persada, 2015).

⁵¹ Ichsan Ibnudin, *Pengantar Akuntansi 1*, 1st edn (Palu, 2021). 34

⁵² Erika Novita, Nadia, Azalia, dkk. "Penerapan SAK ETAP dalam Pencatatan Laporan Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember." *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)* 5.2 (2024).

dan terakhir menyusun neraca. Elemen-elemen penting yang harus disertakan dalam laporan keuangan meliputi: nama perusahaan, judul laporan, tanggal atau periode yang dicakup, serta struktur laporan tersebut.

Adapun keterkaitan dari laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan neraca yaitu:

- 1) Laporan laba rugi mencatat laba bersih atau kerugian bersih yang dihitung dengan mengurangi beban dari pendapatan. Karena pendapatan dan beban juga termasuk dalam laporan perubahan posisi keuangan, maka selisih antara keduanya (laba/kerugian bersih) akan dipindahkan ke laporan perubahan posisi keuangan.
 - 2) Modal merupakan elemen dalam neraca, sehingga sisa akhir dalam laporan perubahan posisi keuangan akan dipindahkan ke neraca. Nilai ini adalah komponen akhir dalam keseimbangan neraca.⁵³
- ### 3. Definisi Laporan Keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkannya untuk mengambil keputusan.

⁵³ Nasution, Manahan. *Siklus akuntansi*. Universitas Sumatera Utara (2004).

Laporan keuangan pada organisasi bisnis atau perusahaan berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan pada waktu laporan tersebut disusun. Laporan keuangan dianggap penting karena.⁵⁴

- a. Laporan keuangan digunakan sebagai indikator kemajuan perusahaan secara keseluruhan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Pihak eksternal, seperti kreditur dan investor, dapat memanfaatkan laporan keuangan untuk mengevaluasi atau memantau kondisi perusahaan.
- b. Ketika pemilik perusahaan memiliki kepercayaan pada manajemen atau pimpinan, laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kepercayaan tersebut atau sebagai sarana pertanggungjawaban.
- c. Manajemen juga menggunakan laporan keuangan untuk memantau perkembangan perusahaan dan memberikan gambaran keseluruhan. Dikarenakan laporan keuangan bersifat historis.

4. Tujuan Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan memiliki berbagai tujuan dan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Secara umum, tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan adalah:⁵⁵

⁵⁴ Herispon, “*Analisis Laporan Keuangan*” (Pekanbaru, 2016).

⁵⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68.

- a. Memahami kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, termasuk aset, kewajiban, modal, dan kinerja operasional yang diperoleh di berbagai periode.
- b. Mengidentifikasi kelemahan yang dapat menjadi hambatan bagi perusahaan.
- c. Mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan.
- d. Menyadari langkah perbaikan yang perlu diambil di masa depan berdasarkan kondisi keuangan perusahaan saat ini.
- e. Mengevaluasi apakah kinerja manajemen di masa mendatang perlu diperbaiki atau diteruskan, tergantung dari kesuksesan atau kegagalannya.
- f. Dapat digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan lain yang serupa.

Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang dipercayakan kepadanya digunakan secara efisien dan efektif, dan tanggung jawab ini ditunjukkan melalui penyajian laporan keuangan.

6. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren adalah bentuk lembaga pendidikan tradisional dimana para santri tinggal dan belajar bersama dibawah bimbingan seorang kyai atau guru, serta berpartisipasi dalam kegiatan lain demi kepentingan mereka. Para santri tinggal

dikompleks yang juga dilengkapi dengan masjid untuk beribadah, ruang belajar, serta fasilitas untuk kegiatan keagamaan lainnya. Biasanya, area pesantren dikelilingi oleh dinding untuk mengawasi keluar masuknya santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pesantren juga dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama yang biasanya menggunakan metode nonklasikal. Disini, seorang kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada para santri berdasarkan kitab-kitab berbahasa arab yang ditulis oleh ulama abad pertengahan.⁵⁶

Dalam sistem pendidikan agama Indonesia, pesantren memiliki peran dan fungsi yang unik. Salah satu tugas utama seorang kyai di pesantren adalah membedakan pesantren dari lembaga pendidikan lainnya. Perubahan sosial, budaya, dan ekonomi, terutama selama masa Orde Baru, telah mempengaruhi peran dan kedudukan pesantren ditengah masyarakat.

Peraturan hukum yang mempengaruhi pesantren, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, akan meningkatkan akuntabilitas pesantren terhadap publik. Akibatnya, hubungan dan tanggung jawab pesantren terhadap masyarakat akan semakin berkembang. Pesantren juga dapat dianggap sebagai tempat untuk kehidupan dan sosialisasi, termasuk cara berinteraksi dengan orang lain.

⁵⁶ 'Pesantren - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas', Wikipedia [accessed 18 January 2022].

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, yang dikenal sebagai pesantren, telah berkembang seiring berjalannya waktu. Penambahan awalan “pe” dan akhiran “an” pada kata “santri” membentuk istilah “pesantren,” yang merujuk pada tempat tinggal santri, yakni mereka belajar ilmu agama Islam. Hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadits.⁵⁷

" مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ "

(رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه)

Artinya: “Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Muslim dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘Anhu)

2. Tujuan Pondok Pesantren

Adapun tujuan dari pondok pesantren terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

- a) Tujuan umum pesantren adalah membimbing warga negara untuk memiliki kepribadian Muslim sesuai dengan ajaran Islam, menjadikan mereka individu yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam setiap aspek kehidupan.

⁵⁷ Laily Fitriani, “Pendidikan Peace Building Di Pesantren: Sebuah Upaya Mencegah Radikalisasi”, *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 16.1 (2015).

b) Tujuan khusus pondok pesantren meliputi:

- 1) Mendidik santri agar menjadi Muslim yang taat kepada Allah SWT, berakhlak baik, serta memiliki kecerdasan, keterampilan, dan kesehatan jasmani dan rohani sebagai warga negara yang menghargai nilai-nilai Pancasila.
- 2) Mendidik santri untuk menjadi kader ulama dan mubaligh yang berjiwa sabar, tulus, tangguh, dan dinamis.⁵⁸

3. Unit Usaha Pondok Pesantren

- a) Beberapa pondok pesantren memiliki unit usaha yang dikelola secara mandiri, tetapi tetap menjadi bagian dari badan hukum yayasan pondok pesantren. Unit usaha yang strategis ini termasuk dalam entitas pelaporan pondok pesantren.
- b) Unit usaha pondok pesantren juga dapat beroperasi secara independen sebagai badan hukum yang terpisah, seperti koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk badan hukum lainnya. Unit usaha tersebut tidak termasuk dalam cakupan entitas pelaporan pondok pesantren.

Sebagai lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang tidak berorientasi pada laba, tujuan utama pondok pesantren adalah memberdayakan masyarakat dalam bidang keagamaan. Oleh karena itu, para pengelola pesantren termasuk

⁵⁸ Santi, Nova. "Analisis Pelaporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren (Studi Pada Az Zahra Islamic Boarding School, Way Huwi, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)". Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

pengasuh, pengurus, dan pengajar tidak menerima imbalan upah yang setara dengan kinerja mereka, seperti yang terjadi dalam perusahaan yang berorientasi profit. Tindakan mereka dilakukan dengan penuh keikhlasan.

7. Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP)

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat dikatakan layak. Kelayakan ini tidak hanya mencakup infastruktur, tetapi juga mencakup pengelolaan dan penataan lembaga secara keseluruhan, termasuk aktivitas ekonomi didalamnya. Salah satu aspek penting dari aktivitas ekonomi adalah pengelolaan keuangan, dimana pencatatan dan pelaporan keuangan mencerminkan kelayakan ekonomi pondok pesantren. Oleh karena itu, akuntansi berperan dalam mengelola keuangan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Di Indonesia, standar akuntansi untuk pondok pesantren telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia, menghasilkan Standar Akuntansi Pesantren.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia pada tahun 2018, akuntansi pondok pesantren adalah proses penyusunan laporan keuangan umum untuk menghasilkan informasi keuangan dengan memperhatikan karakteristik dan sifat pondok pesantren, sebagai berikut:

- a) Upaya untuk memperkuat perekonomian pondok pesantren agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- b) Penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren bertujuan memberikan panduan akuntansi yang tidak mengikat, namun membantu pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan.
- c) Pedoman Akuntansi Pesantren ditujukan untuk diterapkan pada pondok pesantren di Indonesia.
- d) Pedoman Akuntansi Pesantren tidak berlaku untuk badan usaha yang memiliki badan hukum sendiri, seperti perseroan terbatas (PT) yang dimiliki oleh pondok pesantren.⁵⁹

Format laporan keuangan pesantren dalam pedoman ini mengikuti PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Laporan keuangan yang harus disusun mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pedoman ini diterapkan bagi pesantren yang berbadan hukum yayasan, di mana terdapat klarifikasi aset antara pesantren dan pemilik yayasan. Namun pedoman ini tidak berlaku bagi badan usaha berbadan hukum, seperti perseroan terbatas, yang dimiliki oleh pesantren.

⁵⁹ Ikatan Akuntan Indonesia

Berikut adalah beberapa elemen utama laporan keuangan pesantren berdasarkan PAP.

a) Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini menyajikan ringkasan mengenai aset organisasi, liabilitas/kewajiban, dan aset neto/ekuitas.

1) Aset yayasan pondok pesantren merupakan sumber daya yang dikuasai akibat peristiwa sebelumnya dengan harapan memberikan manfaat finansial di masa mendatang. Terdapat dua kategori aset yang dimiliki oleh organisasi yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan, biaya dibayar dimuka, serta kategori aset lancar lainnya. Sedangkan aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, peralatan, dll.

2) Liabilitas diperkirakan akan mengakibatkan keluar sumber daya pesantren, termasuk pembayaran finansial, karena kewajiban merupakan komitmen yang ada saat ini yang berasal dari peristiwa di masa lalu. Terdapat dua jenis kewajiban yang dihadapi pesantren yaitu, liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Liabilitas jangka pendek mencakup pendapatan yang belum direalisasikan, utang jangka pendek, imbalan kerja jangka pendek, serta pembayaran liabilitas jangka pendek. Selain itu ada berbagai

jenis liabilitas jangka panjang yaitu termasuk dalam kategori ini, termasuk kewajiban saat ini.

- 3) Aset Neto adalah hak tersisa yayasan pondok pesantren atas kekayaannya setelah semua kewajiban dilunasi. Nilai sumber daya tergantung pada apakah penyedia sumber daya tersebut membatasi penggunaannya atau tidak. Aturan syariah dan regulasi terkait merupakan batasan mengenai penggunaan aset. Dalam konteks aset neto, terdapat dua kategori yaitu, aset neto terbatas dan tidak terbatas. Pihak yang memberikan sumber daya kepada yayasan pesantren dapat menentukan batasan penggunaan sumber daya tersebut. Misalnya seorang pemberi wakaf (*wakif*) dapat menetapkan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan pesantren hanya boleh digunakan untuk proyek tersebut. Dana harus dipakai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yayasan pesantren memiliki hak untuk mengelola dana yang diterima sesuai dengan hukum syariah. Contohnya, jika seorang *wakif* memberikan tanah kepada yayasan untuk membangun masjid, tanah tersebut akan menjadi bagian dari aset neto. Batasan ini bersifat sementara atau permanen, tergantung pada tercapainya tujuan atau jangka waktu tertentu.

b) Laporan Aktivitas

Laporan ini menjelaskan posisi keuangan Yayasan Pesantren selama periode tertentu. Transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi aset bersih, serta hubungan diantara keduanya, dijabarkan dalam laporan ini. Laporan aktivitas menunjukkan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyediakan program dan layanan. Donor, anggota, kreditur, dan pihak lain mengevaluasi tugas, tanggung jawab, dan kinerja seorang manajer berdasarkan informasi dari laporan aktivitas, yang dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya serta data dari laporan keuangan itu sendiri.

c) Laporan Arus Kas

Laporan ini digunakan untuk memantau jumlah uang yang masuk dan keluar dari operasi, investasi, dari pembiayaan yayasan. Laporan ini membantu menentukan apakah pesantren mampu menghasilkan kas dan setara kas serta memahami pentingnya pengelolaan arus kas tersebut. Informasi tentang arus kas bermanfaat bagi pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Arus kas dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

- 1) Arus kas dari aktivitas operasional, yang mencakup kegiatan yang menghasilkan pendapatan utama serta aktivitas non-investasi dan keuangan lainnya. Pendekatan tidak langsung digunakan untuk menjelaskan arus kas dari operasi.

- 2) Arus kas dari investasi, meliputi investasi jangka panjang seperti pembelian atau penjualan aset jangka panjang, serta investasi non-tunai lainnya.
- 3) Arus kas dari pendanaan, yaitu uang yang diterima dari sumber dana yang memberikan sumber daya tanpa mengharapkan penggantian, serta dividen yang terbatas untuk pembelian aset tetap atau untuk meningkatkan pendanaan.

d) Catatan Atas laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari pembukuan keuangan pesantren yang memberikan penjelasan rinci mengenai laporan keuangan. Catatan ini mencakup uraian umum tentang Yayasan Pesantren, kebijakan akuntansi yang digunakan, serta rincian pos-pos dalam laporan keuangan. Catatan tersebut memberikan penjelasan kualitatif dan kuantitatif untuk informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Secara sistematis, catatan atas laporan keuangan menyajikan:

- 1) Gambaran umum tentang yayasan pondok pesantren, termasuk pendiri, sejarah singkat, dan informasi relevan lainnya. Selanjutnya, catatan tersebut menjelaskan bagaimana dana digunakan untuk keperluan yayasan secara umum.
- 2) Prinsip akuntansi yang diterapkan juga disebutkan, dengan yayasan pesantren menggunakan Laporan ETAP dalam

pelaporan keuangannya, serta laporan arus kas sebagai bagian dari penyusunan laporan keuangan.

- 3) Penjabaran pos-pos dalam laporan keuangan disusun dengan mengikuti urutan penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan informasi tambahan yang relevan, sesuai dengan ketentuan untuk setiap pos.
- 4) Informasi tambahan terkait laporan keuangan pondok pesantren juga disertakan.

8. Pentingnya Penerapan Standar Akuntansi Pesantren

Pesantren harus mematuhi prinsip akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan karena merupakan lembaga nirlaba. Hal ini penting untuk memastikan laporan keuangan yang berfokus pencegahan penipuan dalam pondok pesantren, guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pesantren. Pesantren juga memiliki sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islami dalam pengelolaan keuangan, serta sistem pelaporan keuangan yang memperkuat keunggulan sistem pelaporan keuangan yang memperkuat keunggulan pesantren. Untuk menghasilkan informasi yang jelas, relevan, transparan, dan akuntabel, diperlukan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang efektif.

Akuntansi berperan sebagai sistem informasi dengan mencatat transaksi dalam jurnal yang nilainya dinyatakan dalam

bentuk moneter. Catatan keuangan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan serta untuk pertanggungjawaban manajemen bisnis. Akuntansi sangat penting bagi lembaga pendidikan, karena memungkinkannya untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan mengurangi ketidakpastian terkait laporan keuangan, terutama yang berkaitan dengan aspek ekonomi.

Akuntansi syariah adalah proses pencatatan, pengelompokan, penjumlahan, dan pelaporan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, sistem data akuntansi terdiri dari berbagai media dan fitur akuntansi yang memerlukan alur dan prosedur yang sistematis dan teratur, sehingga data mentah dapat dipahami dan menghasilkan laporan keuangan yang mudah diakses. Otoritas pihak internal dalam proses pengambilan keputusan harus dipahami dan difasilitasi.

Tujuan informasi akuntansi adalah untuk melayani kepentingan publik. Dalam konteks Islam, setiap individu memiliki hak untuk mengetahui dampak kegiatan organisasi terhadap kesejahteraan mereka dan menerima pertanggungjawaban terkait operasional organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta apakah tujuannya telah tercapai. Pelaporan akuntabilitas keuangan sangat penting bagi perkembangan pesantren, dan kebutuhan ini

didukung oleh penerbitan aturan akuntansi pesantren. IAI dan Bank Indonesia mendukung penerbitan standar akuntansi pesantren, karena perkembangan pesantren berkontribusi pada peningkatan sistem ekonomi dan pendidikan Negara. IAI dan BI menetapkan serta merilis standar akuntansi untuk pesantren pada tahun 2018, mengikuti standar akuntansi yang diakui secara umum untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pesantren dan lingkungannya.

Berikut adalah beberapa pedoman pengelolaan keuangan pesantren:

- 1) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP)
- 2) Pemanfaatan anggaran yang tepat
- 3) Pesantren bertanggung jawab secara finansial.

Pedoman ini mengatur bagaimana laporan keuangan pesantren disajikan, diakui, dan diungkapkan. Secara umum, laporan keuangan pesantren memiliki beberapa karakteristik khusus, namun harus mencakup empat laporan utama yaitu: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengelolaan keuangan pesantren dipegang oleh bendahara dan melibatkan pencatatan uang masuk, uang keluar, dan saldo. Pemasukan berasal dari biaya pendidikan yang dibayarkan oleh wali santri selaku *stakeholders*, sementara seluruh biaya operasional pesantren ditutupi oleh dana keluar.

Laporan keuangan menyajikan gambaran sistematis mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Pendapatan dan beban berhubungan langsung dengan kinerja yang tercermin dalam laporan laba rugi, sedangkan aset, kewajiban, dan ekuitas berhubungan dengan evaluasi kondisi keuangan yang ditampilkan di neraca. Selain itu elemen-elemen laba rugi serta beberapa penyesuaian pada item neraca disajikan dalam laporan arus kas.

Penyusunan laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya oleh manajemen, sekaligus sebagai sarana pencatatan atas aktivitas yang telah terjadi. Hal ini juga berlaku bagi pesantren. Sebaliknya, jika pesantren memiliki catatan keuangan yang kuat, hal ini menandakan kemajuan. Perkembangan pesantren juga dapat didukung secara berkelanjutan jika semua pemangku kepentingan memiliki kepercayaan dalam proses pencatatan dan pelaporan dana.⁶⁰

⁶⁰ Fitri, Sri Adella, dkk. "Pentingnya Penerapan Akuntansi Ponpes: Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pariangan." *Jurnal Akuntansi UMMI* 3.2 (2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam dari suatu fenomena berdasarkan data yang berhasil diperoleh⁶¹ tentang penerapan standar akuntansi pesantren berbasis *Islamic corporate governance* di PPI ASHRI Jember. Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah memahami secara mendalam proses dan praktik penyusunan laporan keuangan dan tata kelola yang baik dilakukan oleh pesantren serta penerapannya terhadap standar yang berlaku, serta perlu dianalisis dari sudut pandang pengalaman dan interpretasi pelaku yang terlibat, seperti pengelolaan keuangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PPI ASHRI Jember yang merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam mendidik santri dan masyarakat sekitar. Subjek penelitiannya adalah pengelola keuangan pesantren, yaitu bendahara dan pengurus pondok pesantren yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

⁶¹ M. F. Hidayatulah., dkk. "Strategi Digital Marketing dengan Instagram dan TikTok Pada Butik DOT. id." Human Falah 10.1 (2023).

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan subyek penelitian. Teknik *purposive* adalah metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini dapat didasarkan pada pengetahuan individu terkait aspek yang diteliti atau karena posisi dan wewenang yang dimiliki individu tersebut, yang memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman mendalam mengenai objek atau situasi penelitian.⁶²

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lima informan sebagai sumber data utama. Subyek penelitian ini adalah pengurus dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi di PPI ASHRI Jember. Adapun subyek yang diwawancarai meliputi:

1. Roufah Umar Ketua Majelis pesantren yang memantau penerapan kebijakan dan tata kelola keuangan.
2. Siti Fatimah Rahmatullah Amini selaku Bendahara pesantren sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan pesantren.
3. Miftahul Hasanah sebagai Pengurus pesantren yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dana dan sumber daya pesantren.
4. Nur Janah Selaku wali santri atau *stakeholder* di PPI ASHRI Jember.
5. Nilna Syarofah dan Siti Masrurroh santri di PPI ASHRI Jember.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2017), 300.

Dalam melakukan riset ini peneliti menggunakan dua macam sumber data antara lain:

- a. Data yang dikumpulkan dari informan atau narasumber melalui sesi tanya jawab langsung yang mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sesuai dengan fokus penelitian disebut sebagai data primer.
- b. Sementara itu, data yang diambil dari sumber lain, seperti buku, laporan dokumen, atau jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian, diolah sebagai data sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang diterapkan, seperti wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Setiap teknik harus dijelaskan terkait jenis data yang diperoleh.⁶³ Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam memperoleh data melalui interaksi langsung dengan informan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berikut:

1. Observasi Non-Partisipatif

Observasi Non-partisipatif merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau interaksi yang sedang

⁶³ Tim Penyusun “*pedoman penulisan karya Ilmiah*” 2021.47.

berlangsung. Dalam observasi ini, peneliti tidak ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian, melainkan hanya mencatat dan mengamati perilaku atau fenomena yang terjadi secara alami. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara objektif karena minimnya keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas subjek yang diamati.⁶⁴

2. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dimana wawancara ini dilakukan dengan pengelolaan keuangan pesantren dan *stakeholder*, seperti bendahara, pengurus yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, wali santri dan santri. wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan informasi langsung mengenai pengalaman mereka dalam menyusun laporan keuangan serta bagaimana penerapan akuntansi pesantren berbasis *good governance*.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan pesantren, kebijakan akuntansi internal, serta catatan transaksi harian. Data ini dianalisis untuk melihat

⁶⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, (2016). 310.

kesesuaian laporan keuangan pesantren dengan standar akuntansi yang seharusnya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah:

1. Pengumpulan Data

Observasi, dokumentasi hingga wawancara yang secara dalam yang dilakukan oleh peneliti yaitu suatu cara dalam pengumpulan data yang diperoleh nantinya. Data yang dihasilkan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama sesuai dengan kebutuhan penelitian apabila serasa sudah cukup dalam melakukan penelitian maka data yang dihasilkan. Step awal peneliti melakukan pengamatan secara umum terhadap kondisi obyek yang diteliti, semua bisa dilihat, di dengar serta direkam semuanya. Maka dari itu peneliti mendapatkan data yang sangat banyak dan bervariasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah meringkas hingga memilih hal pokok dan berfokuskan kepada hal penting serta mencari judul dan polanya. Sebab itu data yang direduksi menghasilkan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah bagi peneliti dalam pengumpulan datanya selanjutnya apabila ada kekurangan data yang dibutuhkan.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau diagram yang jelas dan terstruktur. Penyajian ini dilakukan agar pembaca dapat memahami bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pesantren berlangsung.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan ditarik berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan mengonfirmasi kembali kepada subjek penelitian atau dengan membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi data).

F. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil peneliti untuk memastikan keabsahan data dan temuan di lapangan. Untuk mencapai hasil yang valid, penting untuk memeriksa kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, metode, peneliti, dan teori. Teknik triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan validitas hasil penelitian, karena data yang diperoleh menjadi lebih objektif dan akurat.⁶⁵ Dengan demikian, peneliti ini menggunakan triangulasi teknik dan sumber data. Triangulasi teknik adalah cara untuk menguji konsistensi data dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi

⁶⁵ Tim Penyusun “*pedoman penulisan karya Ilmiah*”. 47.

untuk memastikan validitas hasil penelitian. Sedangkan triangulasi sumber yaitu untuk membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan.⁶⁶

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai penulisan laporan selesai.⁶⁷

1. Tahap pra lapangan

Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan referensi yang terkait. Adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

- a. Memilih lokasi penelitian.
- b. Terjun langsung ke lokasi penelitian.
- c. Konsultasi fokus penelitian.
- d. Menentukan fokus penelitian.
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap lapangan

Pada tahap lapangan peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Adapun tahap lapangan sebagai berikut:

⁶⁶ Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 273.

⁶⁷ Tim Penyusun “*pedoman penulisan karya Ilmiah*”, 96.

- a. Memahami latar belakang.
- b. Memasuki lapangan.
- c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan.

3. Tahap akhir penelitian lapangan

Tahap ini adalah proses akhir penelitian. Kemudian peneliti menyusun hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing kemungkinan ada revisi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun tahap akhir penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Penarikan kesimpulan.
 - b. Menyusun data yang ditetapkan.
 - c. Kritik dan saran
4. Tahap penelitian laporan

Setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah dinamis, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yakni meliputi:

- a. Menyusun hasil penelitian.
- b. Konsultasi hasil penelitian.
- c. Perbaikan hasil konsultasi.
- d. Menyiapkan kelengkapan persyaratan ujian.
- e. Munaqosah skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian PPI ASHRI

Pondok Pesantren Islam (PPI) ASHRI Jember merupakan lembaga pendidikan Islam yang terletak di Talangsari Kabupaten Jember. Beberapa aspek penting tentang PPI ASHRI Jember.

1. Sejarah Pondok Pesantren Islam Ash-Shiddiqi Puteri

Gambar 4.1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendiri PPI ASHRI JEMBER

Awal berdirinya Pondok Pesantren Islam Ash-Shiddiqi Puteri ini dirintis oleh Almarhum KH. Abd. Chalim Shiddiq pada tahun 1931, berlokasi di kompleks peninggalan Almarhum KH. M. Siddiq (embah Shiddiq) yang berada di Jl. KH. Shiddiq sekarang lokasi PPI ASHTRA. Bermula dengan jumlah santri puteri 12 orang, beliau juga Murabby Pondok Pesantren Islam As-Shiddiqi dan sekaligus Kepala Jawatan Agama Kabupaten Jember, mendidik santri-santri puteri

dengan sistem sorongan, tanpa kurikulum tetapi berdasarkan jenjang tingkatan yang disesuaikan dengan kemampuan santri.

Berkembangnya jumlah santri menjadi 70 orang pada tahun 1949 mendesak beliau untuk membuat panggung dibagian belakang rumah. Ibu Nyai Hj. Hayat Muzayyanah (Almarhumah) sebagai istri setia beliau, berkiprah langsung mengasuh santri puteri yang jumlahnya kian bertambah terus.

Bertambahnya jumlah santri puteri yang berdatangan dan niat beliau ingin memisahkan lokasi antara santri putera dan santri puteri, mendorong beliau mencari lokasi khusus bagi santri puteri. Pada tahun 1957 beliau dengan upaya swadaya bersama Ibu Nyai Hj. Hayat Muzayyanah dapat membeli sebidang tanah di lokasi sebelah selatan, yang sekarang menjadi kompleks PPI ASHRI.

Pembangunan selesai pada april 1964, namun belum sempurna. Rumah kediaman, Musholla, Bilik, sebanyak 14 kamar, 3 buah sumur, 4 kamar mandi, 4 WC, 1 kamar makan, 2 ruang dapur dan sebuah toko (yang direncanakan untuk koperasi) telah selesai dibangun. Santri puteri kemudian dipindahkan dari PPI ASHTRA yang ada di utara ke selatan dengan jumlah santri 70 orang.

Pendidikan atas santri ditangani langsung oleh beliau bersama Ibu Nyai Hj. Hayat Muzayyanah, disampaikan juga dibentuk kaderisasi dari para santri sendiri yang senior sebagai persiapan untuk tenaga mengajar santri yang lebih kecil/lebih rendah pendidikannya.

Sejak tahun 1965 secara efektif Madrasah dibuka dengan sistem dan kurikulum yang disusun sesuai dengan tujuan didirikannya PPI ASHRI ini. Sistem klasikal diterapkan, yang dipimpin langsung oleh KH. Abd. Chalim Shiddiq sebagai Kepala Madrasah dengan tenaga bantuan beberapa guru dari luar antara lain: KH. A. Muchit Muzadi, Alm. Ustad Danial Adimenggolo, Alm. Ustad Abd. Hadi, dan lain-lain. Saat itu jumlah santri sekaligus siswi Madrasah berjumlah 400 orang. Menyusul efektifnya pendidikan Madrasah ini, didirikannya radio amatir yang dikenal dengan nama Radam ASHRIA (Radio Amatir Ash Shiddiqi putera dan puteri), dimana seluruh crew-nya terdiri dari para santri puteri, kecuali tenaga tehnik. Aktivitas pendidikan Madrasah ini berjalan pesat dengan menempati ruang madrasah yang direncanakan bertingkat namun bagian atasnya belum selesai. Banyak diantara para siswi turut ujian IAIN Cabang Jember, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan.

Perkembangan PPI ASHRI yang demikian menggembirakan ini suatu ketika dikejutkan oleh peristiwa yang sangat memilukan. KH. Abd. Chalim Siddiq, Muassis dan Murabby yang selama ini mengelola PPI ASHRI telah dipanggil kehadapan Allah SWT. Beliau Wafat pada malam Selasa, 16 Muharram tahun 1391 H. (23 Maret 1970).

Ketiadaan beliau tidak membekukan kegiatan pesantren dan Madrasah. Penanganan dan kepemimpinan Pondok Pesantren dilanjutkan oleh Ibu Nyai Hj. Hayat Muzayyanah, karena waktu itu

putera-puteri beliau seluruhnya sedang menuntut ilmu guna mempersiapkan diri menerima tongkat estafet kepemimpinan. Turut membantu Ibu Nyai Muzayyanah dalam meneruskan perjuangan K.H. Abd.Chalim Shiddiq ini, K.H. Shodiq Mahmud, SH. Prof. KH.Chalim Muhammad, SH dan beberapa orang lainnya. Sementara pimpinan madrasah dipegang oleh Alm.KH. Shodiq Machmud, SH.

Keperihatinan PPI-ASHRI dengan wafatnya KH.Abd. Chalim Shiddiq tahun 1970 disusul dengan keperihatinan kembali tahun 1973 saat wafatnya Ibu Nyai Hj. Hayat Muzayyanah, sehingga penanganan PPIASHRI sebagai tradisi di lingkungan pondok pesantren, otomatis menjadi tanggung jawab putera-puteri beliau sebagai ahli waris. Untuk bertindak sebagai sesepuh dan pengendali utama, para ahli waris memohon kesediaan KH. Achmad Shiddiq sebagai Murabby PPI-ASHRI disamping kedudukan beliau sebagai Murabby PPI-ASHTRA. Sedang kegiatan sehari-hari PPI-ASHRI ditangani langsung oleh para ahli waris, putera-puterinya Ibu Nyai Hj. Hayat Muzayyanah beserta para menantu. Namun tanpa diduga sebelumnya, tepat pada hari Rabu 23 Januari 1991, KH. Achmad Shiddiq sebagai Murabby PPI-ASHRI wafat. Dengan demikian, secara otomatis pengendalian, pengelolaan maupun tanggung jawab pondok pesantren kini berada langsung di tangan para puteraputeri K.H. Abd.Chalim Shiddiq beserta para menantunya.⁶⁸

⁶⁸ Dokumentasi, Penulis, 03 Desember 2024

2. Profil PPI ASHRI Jember

Nama	: Pondok Pesantren Islam Ash-Shiddiqi Puteri : (PPI ASHRI) Jember
Alamat	: Jl. K.H. Shiddiq No. 82 Jember
No. Telepon	: (0331) 21210
Tahun berdiri	: 1931
Nama Pendiri	: K.H. Abd. Chalim Shiddiq
Status Lembaga	: Swasta Murni
Azas	: Pancasila
Aqidah	: Islam Ahlussunnah Waljamaah
Pengasuh	: KH. M. Ayyub Saiful Ridjal As.

3. Visi, Misi dan Tujuan PPI ASHRI Jember

a. Visi

Menjadikan PPI Ashri yang berorientasi pada tujuan pondok pesantren Islam Ash-Shiddiqi Puteri yang mencetak kyai perempuan, dengan mengedepankan akhlakul karimah, sebagai landasan ilmu dan keterampilan, yang dimiliki para santri.

b. Misi

Memberikan ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah serta memberikan bimbingan pembinaan akhlak dalam bentuk peneladanan kehidupan sehari-hari atas dasar ajaran Islam Ahlussunnah Waljama'ah.

c. Tujuan

Terwujudnya santri yang cerdas, terampil dan berkepribadian mar'atus shalihah dan berpegang teguh pada aqidah Islam Ahlussunnah Waljama'ah.

4. Data Kepengurusan PPI ASHRI Jember

Data pengurus PPI ASHRI Jember tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

No	Nama	Jabatan
1.	KH. M. Ayyub Saiful Ridjal As	Pengasuh Pesantren
2.	Ro'ufah Umar	Ketua Majelis Pesantren
3.	Miftahul Hasanah	Wakil Ketua Majelis Pesantren
4.	Jihan Maulida Afifatul Ghina	Sekretaris Pesantren
5.	Siti Fatimah Rahmatullah Amini	Bendahara Pesantren
6.	Siti Shofiah	Sie. Pendidikan
7.	Adinda Wafik Lil Himmah	Sie. Pendidikan
8.	Nauro Dina Mumtazah	Sie. Keamanan
9.	Iva Shofia	Sie. Keamanan
10.	Siti Aisyah Safira Ramadhani	Sie. Keamanan
11.	Hidayati	Sie. Kebersihan
12.	Indahtun Ni'mah	Sie. Kesehatan
13.	Ananda Dwi	Sie. Kesehatan
14.	Nuril Lailatul Maghfiroh	Sie. Kesenian
15.	Afiyatin Darti	Sie. Olahraga

Sumber: Data Dokumentasi peneliti (2024)

5. Data Jumlah Santri Pondok Pesantren Islam Ash-Shiddiqi Puteri

Berikut jumlah santri PPI ASHRI:

Tabel 4.2

No	Tingkatan	Jumlah
1	Shifir Awal	100

2	Shifir Tsani	79
3	Tahdliri	112
4	Sufla	71
5	Wustho	48
6	Ulya	91
Total		501

Sumber: Data Dokumentasi peneliti (2024)

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data menjadi sebuah keharusan dalam penelitian. Penyajian data adalah bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus masalah dan analisa data yang relevan. Peneliti berusaha memaparkan hasil temuan dilapangan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data melalui observasi non-partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data sebanyak mungkin terhadap berbagai masalah yang diteliti dan mendukung untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian ini.

Perolehan data dalam penelitian ini adalah tentang pondok pesantren menciptakan *good governance* melalui laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi pesantren, sebagaimana data yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan di PPI ASHRI, wawancara dengan beberapa pengurus pesantren, wali santri selaku donatur, dan santri tentang apapun yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian, penyajian data, dan beberapa temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pesantren melalui Penyusunan Laporan Keuangan di PPI ASHRI

Dalam laporan keuangan, disajikan informasi terkait entitas yang mencakup aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi kepada pemilik, serta arus kas, yang dilengkapi dengan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan PAP, laporan keuangan ini dihasilkan dari siklus akuntansi entitas antara lain yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset neto, serta hubungan antara elemen-elemen tersebut pada periode tertentu. Informasi dalam laporan ini dilengkapi dengan pengungkapan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas. Informasi tersebut berguna bagi donator, kreditur, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran

yang sah dan telah tercantum dalam pedoman Akuntansi Pesantren 2018.

Pada PPI ASHRI dalam penyusunan kas dan setara kas masih terbilang sederhana. Secara umum pemasukan kas PPI ASHRI yang hanya bersumber dari wali santri dalam bentuk pembayaran setiap satu bulan sekali.

Hal ini dijelaskan oleh ketua majelis pesantren Ustadzah Ro'ufah Umar dalam sebuah wawancara yang mengatakan bahwasannya:

“Untuk pemasukan PPI ASHRI ini ya hanya dari wali santri saja dengan membayar syahriah pondok (spp) setiap bulan sekali dan koperasi yang ada didepan kantor itu hanya dibuka setiap hari jumat pada saat hari kiriman santri”.⁶⁹

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwasannya pemasukan kas dari PPI ASHRI bersumber dari wali santri dan koperasi pesantren.

Pemasukan dari wali santri yang membayar syahriah pondok (SPP) yang pembayarannya dilakukan setiap satu bulan sekali serta koperasi yang hanya dibuka pada hari kiriman santri (hari jum'at). Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Siti Fatimah Rahmatullah Amini selaku bendahara PPI ASHRI.

“Ini mbak untuk penyusunan keuangan pondok yang saya lakukan menggunakan buku

⁶⁹ Ustadzah Ro'ufah Umar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 November 2024.

akun kemudian untuk pencatatannya saya lakukan setiap ada transaksi dengan wali santri kan dengan tanggal sesuai pembayaran selanjutnya untuk wali santri diberikan kwitansi sebagai bukti bahwa sudah melakukan pembayaran. Sebenarnya penarikan syahriah santri ini setiap satu bulan sekali cuma terkadang ada sebagian dari santri itu tidak tentu membayarnya ada yang setiap bulan ada juga yang triwulan dan ada yang dirangkap pada saat akan libur santri dikarenakan persyaratan santri untuk pulang harus bebas dari tanggungan pondok pesantren. Dan untuk yang koperasi ini mbak pencatatan pemasukan dan pengeluarannya saya menggunakan buku lain agar tidak tercampur dengan buku syahriah pondok ini”.⁷⁰

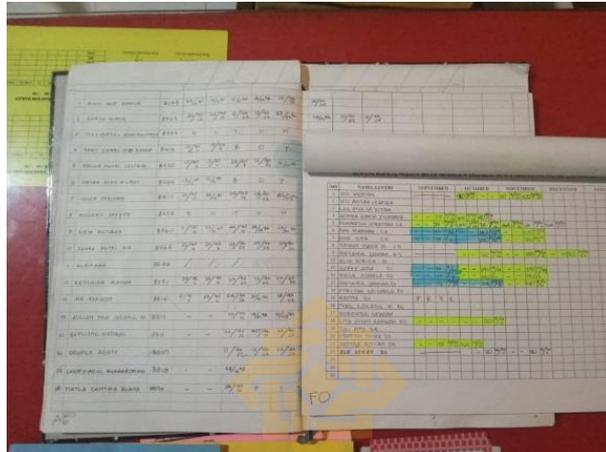
Berdasarkan wawancara diatas tersebut dapat diketahui bahwasannya penarikan keuangan santri dilakukan setiap bulan sekali yaitu SPP. Akan tetapi terdapat juga wali santri yang membayar keuangannya setiap bulan, ada juga yang membayar triwulan dan dirangkap pada saat mau liburan santri. Kemudian untuk koperasi dicatat dengan buku yang berbeda agar tidak tercampur dengan buku pembayaran syahriah santri.

Laporan posisi keuangan SPP dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini.

⁷⁰ Siti Fatimah Rahmatullah Amini, diwawancarai oleh Penulis, Jember 29 November 2024

Gambar 4.2

Bukti Pencatatan Keuangan Santri



Sumber: Data Dokumentasi Peneliti (2024)

Berdasarkan gambar 4.2 diatas posisi laporan keuangan santri masih belum sesuai. Dikarenakan pelaporan tersebut hanya memuat kolom pemasukan keuangan pesantren.

b) Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan hak bagi yayasan Pondok Pesantren untuk menagih pembayaran tunai atau setara tunai dari pihak lain. Hal ini telah dijelaskan dalam pedoman Akuntansi Pesantren yang diterbitkan pada tahun 2018.

PPI ASHRI mempunyai piutang dalam transaksinya, karena aktivitas pemasukan pada pondok pesantren yang berasal dari wali santri membayar uang

bulanan SPP. Berdasarkan wawancara dengan wakil ketua Majelis pesantren Miftahul Hasanah.

“Untuk penyusunan laporan keuangan disini masih manual jadi ada buku akun lalu di beri garis dan ditulis, nah sedangkan dengan pelaporan itu disesuaikan dengan yang bertugas untuk meminta apabila ada wali santri yang mau membayar syahriah pondok ya ditulis lalu diberikan kwitansi bukti pembayaran. Habis itu dilaporkan dan diserahkan kepada ketua majelis pesantren yaitu Ustadzah Ro’ufah Umar. Apabila ada santri yang tidak membayar setiap bulannya maka wali santri akan dihubungi oleh pihak pondok pesantren dan ditanyakan alasannya kenapa tidak membayar. Namun apabila wali santri bilang telah membayar syahriah pondok yang diserahkan kepada anaknya akan tetapi tidak dibayarkan maka dari itu banyak kejadian yang terjadi pada santri ketika uang yang diberikan orang tuanya untuk membayar keuangan pesantren tetapi tidak dibayarkan bahkan malah uang tersebut dibelikan barang lain seperti beli baju. Namun dari permasalahan tersebut biasanya di selesaikan secara kekeluargaan bahkan orang tua anak yang bermasalah langsung meminta maaf kepada ketua pengurus pesantren karena anak telah berbohong namun setelah permasalahan selesai akan tetap membayar namun yang membayarnya dari orang tuanya langsung tidak melalui anaknya lagi. Dikarenakan banyak terjadi permasalahan seperti itu diberikan peraturan baru bahwa untuk pembayaran syahriah pondok agar wali santri yang langsung membayar kepada bendahara pondok”.⁷¹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya ketika ada santri yang tidak membayar syahriah pondok, dikarenakan dapat diketahui beberapa alasan santri kenapa tidak bisa membayarnya yaitu masih belum ada kiriman. Maka dari itu pihak pengurus

⁷¹ Miftahul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 November 2024.

pesantren akan menghubungi wali santri yang tidak membayar syahriah pesantren untuk menanyakan lebih jelas, kenapa anaknya masih belum membayar syahriah pesantren. Namun terkadang jawaban wali santri telah memberikan uang kepada anaknya untuk membayar syahriah pesantren. Oleh karena itu dengan menghubungi wali santri tersebut dapat diketahui yang bermasalah itu dari pihak mana, dikarenakan terlalu banyak kejadian yang serupa wali santri sudah memberikan uang kepada anaknya, namun sama anaknya tidak dibayarkan uang tersebut terkadang dipergunakan dengan hal lain diluar kepentingan pondok.

Dengan pernyataan di atas juga diungkapkan oleh Nilna Syarafah dan Siti Masruroh selaku santriwati bahwasannya:

“Biasanya santri-santri disini juga tidak nentu kak bayar uang bulanannya terkadang waktu mereka kiriman orang tuanya baru bayar terkadang juga uang yang sudah diberikan oleh orang tuanya untuk bayar syahriah pesantren tidak dibayarkan, biasanya dibuat kepentingan pribadi mereka masing-masing dikarenakan sudah sering terjadi hal seperti itu disini kak.”⁷²

Dari semua pernyataan kedua diatas ada kesamaan bahwasannya para santri terkadang sering terjadi tidak membayar syahriah pesantren mereka yang sudah

⁷² Nilna Syarafah dan Siti Masruroh, diwawancarai oleh Penulis, 01 Desember 2024.

diberikan oleh orang tuanya dan uang tersebut dibuat kepentingan pribadi mereka masing-masing.

c) Persediaan

Aset yang dimaksud mencakup barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, barang dalam proses produksi yang ditujukan untuk penjualan, serta bahan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Pada yayasan pondok pesantren, jenis penelitian meliputi barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan baku. Hal ini telah diatur dalam Pedoman Akuntansi Pesantren tahun 2018 terkait pengelolaan persediaan.

PPI ASHRI memiliki usaha seperti koperasi kecil.

Hasil wawancara dari ketua majelis pesantren ustadzah Ro'ufah Umar yaitu:

“Seperti yang kamu tau didepan kantor pondok itu ada koperasi kecil yang menjual seperti sarung, mukenah, konter (tasbih digital), gelang kaokah, al-qur'an dan kitab. Dan itu bukanya seminggu sekali pada hari jum'at (hari kiriman)”.⁷³

Berdasarkan wawancara diatas bahwasannya PPI ASHRI memiliki persediaan usaha berupa barang-barang yang dijual di koperasi tersebut.

⁷³ Ro'ufah Umar, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 26 November 2024.

Hal tersebut juga dikatakan oleh wakil majelis pondok pesantren Miftahul Hasanah pada wawancara bahwasannya:

“Kalau di pesantren ini pondok memiliki usaha yang ada didepan kantor pondok pesantren itu menjual aneka kebutuhan santri seperti mukenah, sarung, tasbih digital, al-qur’an dll. Biasanya dibuka hanya pada hari jumat hari kiriman santri selain itu tidak dibuka. Dan untuk laba atau keuntungannya itu buat pondok akan tetapi pencatatannya dibedakan”.⁷⁴

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh wakil majelis pesantren juga sama dengan apa yang disampaikan oleh ketua majelis pesantren bahwasannya pondok pesantren memiliki usaha.

d) Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran yang manfaatnya akan digunakan pada periode mendatang, sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren tahun 2018. Biaya ini juga berfungsi mendukung operasional yayasan pondok pesantren serta kegiatan usahanya. Contohnya adalah biaya sewa yang dibayarkan dimuka.

PPI ASHRI ini penyajian biaya dibayar dimuka ada. Hal ini terdapat pembayaran syahriah pondok yang dilakukan oleh wali santri. Berdasarkan wawancara

⁷⁴ Miftahul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 November 2024.

dengan wakil ketua majelis pesantren Miftahul Hasanah mengatakan bahwasannya:

“Iya kalo pondok terkadang biaya dibayar dimuka itu didapatkan dari wali santri yang bayar syahriah pondok. Biasanya wali santri yang sudah panen tani itu langsung bayar full selama 1 tahun atau separuhnya”.⁷⁵

Berdasarkan wawancara diatas bahwasannya PPI ASHRI untuk biaya dibayar dimuka dihasilkan dari santri yang membayar syahriah pondok. Dikarenakan orang tua atau wali santri yang sudah panen tani jadi melakukan pembayaran dimuka selama 1 tahun atau separuhnya.

Pada wawancara bersama Siti Fatimah Rahmatullah Amini selaku bendahara pondok pesantren menjelaskan bahwasannya:

“Untuk pembayaran dimuka itu ada mbak, biasanya kalo yang seperti itu wali santri sedang panen tani jadi dibayar 1 tahun ada juga yang 6 bulan dan ada juga yang bayar setiap bulan sekali”.⁷⁶

Dalam kedua wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wali santri itu juga ada yang membayar diawal secara lunas dan setengahnya serta ada yang bayar setiap bulannya.

⁷⁵ Miftahul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 November 2024.

⁷⁶ Siti Fatimah Rahmatullah Amini, diwawancarai oleh Penulis, Jember 29 November

b. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas dalam akuntansi pesantren mencakup tiga jenis aset neto: aset neto tidak terikat, aset neto terikat sementara, dan aset neto terikat permanen. Aset neto tidak terikat merupakan sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi secara khusus oleh pemberi dana. Pendapatan tidak terikat ini berasal dari beberapa sumber, seperti kontribusi santri, hibah dari pendiri dan pengurus yayasan, koperasi, serta masyarakat umum. Penggunaan dana tidak dikhususkan untuk kebutuhan operasional, seperti beban pendidikan, biaya akomodasi, serta beban umum dan administrasi.

Sementara itu, aset neto terikat permanen mencakup sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen oleh pemberi dana, sehingga tidak dapat diubah. Namun, organisasi nirlaba seperti pesantren tetap diperbolehkan untuk memanfaatkan penghasilan atau manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya tersebut. Contoh aset ini meliputi uang wakaf, benda wakaf bergerak selain uang, hasil bersih pengelolaan dan pengembangan wakaf, serta alokasi hasil pengelolaan wakaf tersebut. Dengan adanya pembagian aset neto ini, pesantren dapat mengelola dana secara transparan dan akuntabel, baik untuk kebutuhan operasional maupun tujuan jangka panjang.

Dalam laporan aktivitas di PPI ASHRI dalam penyusunan laporan keuangannya masih menggunakan manual. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan wakil ketua majelis Miftahul Hasanah menjelaskan bahwasannya:

“Untuk pencatatan disini masih manual, biasanya yang dicatat itu pemasukan dan pengeluaran akan tetapi paling sering pengeluarannya ya karena paling banyak dari pada pendapatannya untuk pendapatannya sendiri yaitu dari wali santri yang membayar syahriah pondok dan koperasi pesantren, karena pondok ini tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah ataupun sumbangan dari masyarakat. Meski demikian Alhamdulillah cukup dan pondok tidak pernah sampai memiliki hutang, meskipun pengeluarannya banyak, dawuh dari beliau (pengasuh) “seng penting barokah”.⁷⁷

Berdasarkan wawancara diatas PPI ASHRI penyusunan laporan keuangannya masih manual, dan laporan dicatat yaitu pemasukan dan pengeluaran. Untuk pendapatannya yaitu dari wali santri yang membayar syahriah pondok pesantren dan koperasi pesantren.

Pada wawancara bersama dilakukan dengan bendahara pondok pesantren Siti Fatimah Rahmatullah Amini mengatakan bahwasannya:

“Disini mbak untuk pencatatannya masih manual dan biasanya yang saya catat itu pemasukan dan pengeluaran. Untuk pendapatan utama pesantren sendiri itu dari pembayaran syahriah santri dan koperasi didepan kantor itu. Selain itu untuk pengeluaran rutin yang digunakan untuk membayar ustadz, listrik dan biaya operasional pesantren lainnya. Pengelolaan keuangan ini

⁷⁷ Miftahul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 November 2024.

dilakukan secara sederhana yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya”.⁷⁸

Dalam kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan utama pondok pesantren berasal dari wali santri, pendapatan koperasi yang menjual barang-barang seperti sarung, mukenah, tasbih digital dll. Selain itu juga terdapat pengeluaran rutin yang digunakan untuk membayar gaji ustadz, listrik, dan biaya operasional lainnya.

Bukti Pencatatan Pengeluaran

Gambar 4.3

SAHAR 1445	SEPTEMBER 2024 / ANJAL 1445 H
1. Biaya listrik	10.000
2. Biaya air	5.000
3. Biaya gas	15.000
4. Biaya bahan bakar	20.000
5. Biaya pembelian barang	50.000
6. Biaya gaji ustadz	100.000
7. Biaya gaji karyawan	50.000
8. Biaya gaji santri	10.000
9. Biaya gaji tukang	5.000
10. Biaya gaji tukang kayu	10.000
11. Biaya gaji tukang batu	10.000
12. Biaya gaji tukang besi	10.000
13. Biaya gaji tukang listrik	10.000
14. Biaya gaji tukang air	10.000
15. Biaya gaji tukang tukang	10.000
16. Biaya gaji tukang tukang	10.000
17. Biaya gaji tukang tukang	10.000
18. Biaya gaji tukang tukang	10.000
19. Biaya gaji tukang tukang	10.000
20. Biaya gaji tukang tukang	10.000
21. Biaya gaji tukang tukang	10.000
22. Biaya gaji tukang tukang	10.000
23. Biaya gaji tukang tukang	10.000
24. Biaya gaji tukang tukang	10.000
25. Biaya gaji tukang tukang	10.000
26. Biaya gaji tukang tukang	10.000
27. Biaya gaji tukang tukang	10.000
28. Biaya gaji tukang tukang	10.000
29. Biaya gaji tukang tukang	10.000
30. Biaya gaji tukang tukang	10.000
31. Biaya gaji tukang tukang	10.000
32. Biaya gaji tukang tukang	10.000
33. Biaya gaji tukang tukang	10.000
34. Biaya gaji tukang tukang	10.000
35. Biaya gaji tukang tukang	10.000
36. Biaya gaji tukang tukang	10.000
37. Biaya gaji tukang tukang	10.000
38. Biaya gaji tukang tukang	10.000
39. Biaya gaji tukang tukang	10.000
40. Biaya gaji tukang tukang	10.000
41. Biaya gaji tukang tukang	10.000
42. Biaya gaji tukang tukang	10.000
43. Biaya gaji tukang tukang	10.000
44. Biaya gaji tukang tukang	10.000
45. Biaya gaji tukang tukang	10.000
46. Biaya gaji tukang tukang	10.000
47. Biaya gaji tukang tukang	10.000
48. Biaya gaji tukang tukang	10.000
49. Biaya gaji tukang tukang	10.000
50. Biaya gaji tukang tukang	10.000
51. Biaya gaji tukang tukang	10.000
52. Biaya gaji tukang tukang	10.000
53. Biaya gaji tukang tukang	10.000
54. Biaya gaji tukang tukang	10.000
55. Biaya gaji tukang tukang	10.000
56. Biaya gaji tukang tukang	10.000
57. Biaya gaji tukang tukang	10.000
58. Biaya gaji tukang tukang	10.000
59. Biaya gaji tukang tukang	10.000
60. Biaya gaji tukang tukang	10.000
61. Biaya gaji tukang tukang	10.000
62. Biaya gaji tukang tukang	10.000
63. Biaya gaji tukang tukang	10.000
64. Biaya gaji tukang tukang	10.000
65. Biaya gaji tukang tukang	10.000
66. Biaya gaji tukang tukang	10.000
67. Biaya gaji tukang tukang	10.000
68. Biaya gaji tukang tukang	10.000
69. Biaya gaji tukang tukang	10.000
70. Biaya gaji tukang tukang	10.000
71. Biaya gaji tukang tukang	10.000
72. Biaya gaji tukang tukang	10.000
73. Biaya gaji tukang tukang	10.000
74. Biaya gaji tukang tukang	10.000
75. Biaya gaji tukang tukang	10.000
76. Biaya gaji tukang tukang	10.000
77. Biaya gaji tukang tukang	10.000
78. Biaya gaji tukang tukang	10.000
79. Biaya gaji tukang tukang	10.000
80. Biaya gaji tukang tukang	10.000
81. Biaya gaji tukang tukang	10.000
82. Biaya gaji tukang tukang	10.000
83. Biaya gaji tukang tukang	10.000
84. Biaya gaji tukang tukang	10.000
85. Biaya gaji tukang tukang	10.000
86. Biaya gaji tukang tukang	10.000
87. Biaya gaji tukang tukang	10.000
88. Biaya gaji tukang tukang	10.000
89. Biaya gaji tukang tukang	10.000
90. Biaya gaji tukang tukang	10.000
91. Biaya gaji tukang tukang	10.000
92. Biaya gaji tukang tukang	10.000
93. Biaya gaji tukang tukang	10.000
94. Biaya gaji tukang tukang	10.000
95. Biaya gaji tukang tukang	10.000
96. Biaya gaji tukang tukang	10.000
97. Biaya gaji tukang tukang	10.000
98. Biaya gaji tukang tukang	10.000
99. Biaya gaji tukang tukang	10.000
100. Biaya gaji tukang tukang	10.000

Sumber: Data Dokumentasi Peneliti (2024)

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas pesantren adalah bagian dari laporan keuangan yang mencatat aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Laporan ini membantu pengelola pesantren

⁷⁸ Siti Fatimah Rahmatullah Amini, diwawancarai oleh Penulis, Jember 29 November 2024

memahami bagaimana uang tunai digunakan dan dari mana sumber pendapatan berasal.

Dalam informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada PPI ASHRI terdapat dari laporan arus kas selama periode tertentu. Berikut laporan arus kas PPI ASHRI:

Tabel 4.3
Arus Kas Masuk Dan Keluar PPI ASHRI 4.3

Uraian	Jumlah (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Kas Masuk:	
- Penerimaan dari wali santri	XXXXXX
- Pendapatan dari koperasi pesantren	XXXXXX
Total Kas Masuk	XXXXXX
Kas keluar:	
- Pembayaran Gaji Ustadz dan Ustadzah	XXXXXX
- Pembayaran Tagihan listrik dan air	XXXXXX
- Biaya Operasional lainnya	XXXXXX
Total Kas Keluar	XXXXXX
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	XXXXXX

Sumber: Data diolah (penulis)

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa laporan ini memberikan gambaran jelas tentang aliran dana dan dapat digunakan untuk memancarkan efisiensi pengelolaan keuangan di PPI ASHRI.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan perlu disusun secara sistematis dengan mengikuti urutan yang sesuai dengan

komponen utama laporan keuangan, karena merupakan bagian integral yang tidak dapat dikeluarkan dari pengelolaan keuangan tersebut.

Setelah dilihat dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas pada catatan atas laporan keuangan yang dimiliki PPI ASHRI masih belum tersajikan dengan baik dan benar, yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja laporan tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Tujuan utama dari catatan atas laporan keuangan adalah untuk menunjukkan kepatuhan pondok pesantren terhadap Pedoman Akuntansi Pesantren dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Catatan ini memuat kebijakan akuntansi yang diterapkan serta penjelasan terkait pos-pos penting dalam laporan keuangan yang relevan bagi pondok pesantren.

PPI ASHRI sangat banyak memiliki kendala dan kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu, kurangnya pemahaman pengurus pesantren, kurangnya sumber daya yang tersedia seperti computer dan perangkat lunak lainnya, serta pelatihan tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan pesantren yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren

PPI ASHRI menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan laporan keuangan, yang disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya pemahaman pengurus

pesantren mengenai standar dan prinsip akuntansi yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, terbatasnya sumber daya yang tersedia, baik dalam hal tenaga profesional di bidang akuntansi maupun perangkat pendukung seperti perangkat lunak akuntansi, yang dapat membantu proses penyusunan laporan keuangan. Ketiga, minimnya pelatihan dan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren membuat pengurus tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan yang disusun belum optimal dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar tata kelola keuangan berbasis *good governance*.

2. Menciptakan *Good Governance* melalui Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pesantren

Dalam menciptakan *Good Governance*, PPI ASHRI Jember menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi melalui laporan keuangan mereka. Beberapa elemen penting yang perlu dijelaskan adalah:

1. Transparansi

Transparansi (keterbukaan) berperan penting dalam memastikan setiap aliran dana, baik pemasukan maupun pengeluaran, dilaporkan dengan jelas. Laporan keuangan harus dibuat terbuka untuk semua pemangku kepentingan, termasuk wali santri. Prinsip ini menjamin kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Meski demikian, laporan keuangan mereka saat ini masih sederhana dan belum sepenuhnya memadai dalam mencakup semua aspek keuangan sesuai standar akuntansi pesantren.

Dalam informasi mengenai laporan keuangan di PPI ASHRI, transparansi (keterbukaan) hanya diberikan kepada pihak pengurus seperti ketua majelis, wakil ketua majelis, dan bendahara pesantren, sedangkan wali santri (*stakeholders*) tidak dilibatkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Siti Fatimah Rahmatullah Amini mengatakan bahwasannya:

“Itu mbak dalam hal transparansi atau keterbukaan laporan keuangan pondok ini hanya saya selaku bendahara, wakil ketua majelis, serta ketua majelis saja. Kalo untuk wali santri itu tidak mengetahui tentang laporan keuangan di pondok”.⁷⁹

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan di PPI ASHRI Jember masih terbatas dan belum optimal. Keterbukaan laporan

⁷⁹ Siti Fatimah Rahmatullah Amini, diwawancarai oleh Penulis, Jember 29 November 2024

keuangan hanya melibatkan bendahara, wakil ketua majelis, dan ketua majelis, sementara wali santri sebagai pemangku kepentingan penting tidak memiliki akses terhadap laporan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan masih bersifat internal dan belum mencakup pihak eksternal, meskipun wali santri turut berkontribusi dalam pembiayaan pesantren.

Wawancara juga dilakukan dengan Nur Jannah (wali santri) selaku *stakeholders* pondok pesantren mengatakan bahwasanya:

“Itu ndukk untuk laporan keuangan di pondok, saya tidak mengetahui secara detail. Biasanya, jika sudah waktunya membayar syahriah pondok, saya tinggal membayarnya saja.”⁸⁰

Dalam kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Minimnya keterbukaan ini dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas, karena kurangnya akses terhadap informasi dapat menimbulkan kesalahpahaman atau menurunkan tingkat kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, transparansi ini juga menjadi hambatan bagi PPI ASHRI dalam mencapai standar tata kelola yang baik (*Good Governance*), mengingat transparansi merupakan salah satu pilar utamanya.

⁸⁰ Nur Jannah, diwawancarai oleh Penulis, Jember 02 Desember 2024

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti pesantren harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang diterimanya. Pengelola keuangan, seperti bendahara pesantren, menyusun laporan tentang penggunaan dana santri, donasi, dan hasil usaha pesantren. Namun keterbatasan pengetahuan mengenai standar akuntansi menyebabkan laporan keuangan tersebut belum bisa mencerminkan kinerja keuangan secara menyeluruh. Akuntabilitas ini dapat ditingkatkan dengan mengadopsi Pedoman Akuntansi Pesantren yang lebih komprehensif.

Dalam informasi Laporan keuangan PPI ASHRI mencakup penerimaan dan pengeluaran, namun belum mampu untuk menunjukkan akuntabilitas secara penuh. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Siti Fatimah Rahmatullah Amini mengatakan bahwasannya:

“Untuk laporan keuangan di PPI ASHRI saya hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja mbak, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang standar akuntansi pesantren, minimnya sumber daya pesantren seperti komputer , serta kurangnya pelatihan mengenai akuntansi”.⁸¹

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pesantren yang seharusnya mencakup posisi laporan

⁸¹ Siti Fatimah Rahmatullah Amini, diwawancarai oleh Penulis, Jember 29 November 2024

keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Wawancara bersama juga dilakukan dengan Miftahul Hasanah selaku Wakil Ketua Majelis Pondok Pesantren mengatakan bahwasannya:

“Untuk laporan keuangan di pondok ini menurut saya sudah tanggung jawab, dikarenakan setiap ada pemasukan dan pengeluaran pasti dicatat, jadi ada bukti dana pondok itu diperuntukkan untuk apa saja, mengapa hanya pemasukan dan pengeluaran saja yang dicatat ya dikarenakan kurangnya pengetahuan dari staf pengelolaan keuangan, minimnya sumber daya seperti, komputer yang kurang memadai, serta kurangnya pelatihan”.⁸²

Dalam kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan, yang dapat mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan pesantren untuk memenuhi prinsip tata kelola yang baik. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan akuntansi pesantren dan dukungan dari pihak eksternal guna memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan di pesantren.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab (*Responsibility*) dalam konteks *Good Governance* mengacu pada kewajiban suatu organisasi atau lembaga untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku,

⁸² Miftahul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Jember 28 November 2024

memastikan bahwa semua aktivitas dan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar yang ditetapkan. Selain itu, lembaga juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, termasuk menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan serta menjalankan program-program yang mendukung keinginan sosial dan lingkungan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam pengelolaan keuangan, tanggung jawab ini diwujudkan dengan memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan organisasi.

Dalam informasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan di PPI ASHRI belum memiliki kebijakan tertulis. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ustadzah Ro'ufah Umar mengatakan bahwasannya:

“Jadi untuk kebijakan di pondok itu tidak tertulis terkait tata kelola keuangan yang baik, biasanya pengelolaan keuangan itu dilakukan berdasarkan keputusan internal yang hanya melibatkan ketua majelis, wakil, dan bendahara, akan tetapi kami berusaha mengelola dana pesantren sebaik mungkin untuk kebutuhan operasional, meskipun tidak ada kebijakan yang tertulis kami selaku pengurus pesantren insyaallah amanah (tanggung jawab) terkait dana yang masuk ke pesantren”.⁸³

⁸³ Ustadzah Ro'ufah Umar, diwawancarai oleh Penulis, Jember 26 November 2024

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan di PPI ASHRI masih belum tertulis, akan tetapi pihak pesantren berusaha mengelola dana yang masuk sebaik mungkin.

Wawancara juga dilakukan dengan ibu Nur Jannah selaku wali santri (*Stakeholders*)

“Itu nduk ibu selaku wali santri tidak ikut campur dalam dana dan pengelolaan yang ada di pesantren, akan tetapi ibu percaya kepada pengurus pesantren bahwa dana yang digunakan untuk kebutuhan yang baik oleh pihak pesantren”.⁸⁴

Dari kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan tata kelola keuangan di PPI ASHRI belum memiliki aturan formal atau tertulis. Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan keputusan internal yang melibatkan ketua majelis, wakil ketua, dan bendahara, tanpa melibatkan pihak eksternal seperti wali santri. Meski demikian, pengurus pesantren berkomitmen untuk mengelola dana dengan amanah (tanggung jawab) dan memastikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan operasional pesantren. Sementara itu, wali santri tidak terlibat dalam pengelolaan dana pesantren, tetapi menunjukkan kepercayaan penuh kepada pengurus dalam penggunaan dana tersebut untuk tujuan yang baik.

⁸⁴ Ibu Nur Jannah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 02 Desember 2024.

4. Kemandirian (*Independensi*)

Kemandirian (*Independensi*) adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsi manajemennya secara mandiri tanpa adanya intervensi atau dominasi dari pihak internal maupun eksternal.

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dan kebijakan pelaksanaan dilakukan berdasarkan aturan, nilai, dan kepentingan organisasi itu sendiri, bukan karena tekanan atau pengaruh pihak lain.

Dalam informasi yang sudah disampaikan diatas PPI ASHRI mengelola keuangannya secara internal, dengan keputusan keuangan yang melibatkan ketua majelis, wakil ketua, dan bendahara. Tidak ada pengaruh dari pihak luar, seperti *Stakeholders* (wali santri) atau lembaga pemerintah, dalam pengambilan keputusan strategi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan keuangannya.

Pesantren bergantung pada dana dari santri Syahriah pondok dan hasil usaha pesantren untuk kebutuhan operasionalnya. Namun terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi dan minimal pelatihan menunjukkan tidak adanya tantangan dalam mencapai kemandirian yang optimal, meskipun PPI ASHRI memiliki

tingkat kemandirian yang tinggi dalam pengelolaan keuangan, keterbatasan dalam penerapan standar akuntansi pesantren dan kurangnya infrastruktur modern menjadi hambatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola.⁸⁵

5. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan dapat diartikan sebagai prinsip dalam tata kelola keuangan dan operasional pesantren yang bertujuan untuk memberikan perlakuan yang setara dan proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks pesantren, keadilan menjadi landasan untuk menciptakan keharmonisan antara pengurus, santri, wali santri, donatur, dan masyarakat.

Dalam informasi terkait keadilan di pesantren. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ustadzah Ro'ufah Umar mengatakan bahwasannya:

“Pesantren ini sangat memperhatikan, terutama kepada santri yang kurang mampu. Di pondok ini ada beberapa santri yang dibebaskan dari tanggungan pondok dikarenakan kurang mampu, dan ada juga keringanan yang diberikan oleh pesantren jika ada santri yang belum membayar syahriah pondok ataupun uang makan dengan alasan belum panen tani, akan tetapi santri juga mendapatkan fasilitas yang sama seperti santri lainnya”.⁸⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa PPI ASHRI Jember memiliki komitmen yang kuat terhadap

⁸⁵ Dokumentasi penulis, Jember 03 Desember 2024.

⁸⁶ Ustadzah Ro'ufah Umar, diwawancarai oleh Penulis, Jember 26 November 2024

prinsip keadilan (*fairness*), terutama dalam mendukung santri yang kurang mampu. Dengan memberikan ruang atau keringanan biaya, pesantren menciptakan lingkungan inklusif yang memastikan setiap santri mendapatkan hak yang sama dalam fasilitas dan layanan pendidikan, tanpa memperhatikan kondisi ekonomi keluarganya. Langkah ini tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial tetapi juga memperkuat prinsip *good governance* dalam aspek keadilan dan akuntabilitas.

Wawancara yang sama juga dilakukan dengan Nilna Syarofah dan Siti Masruroh selaku santri mengatakan:

“Iya kak, semua santri mendapatkan perlakuan yang sama. Misalnya dalam pembagian makanan dan fasilitas belajar, apalagi teman-teman yang tidak bisa membayar penuh syahriah pondok tetap bias ikut kegiatan pondok tanpa membedakan”.⁸⁷

Dari kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa PPI ASHRI Jember sangat memperhatikan prinsip keadilan (*fairness*) dalam pengelolaan dan penyediaan fasilitas bagi seluruh santri, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pesantren memberikan pembebasan tanggungan biaya pondok kepada santri yang kurang mampu dan memberikan keringanan pembayaran bagi santri yang menghadapi kesulitan sementara, seperti menunggu hasil panen tani. Meskipun

⁸⁷ Nilna Syarofah dan Siti Masruroh, diwawancarai oleh Penulis, 01 Desember 2024.

demikian, semua santri, baik yang mampu maupun kurang mampu, tetap mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk dalam akses terhadap makanan, fasilitas belajar, dan partisipasi dalam kegiatan pondok. Tidak ada diskriminasi terhadap santri yang belum mampu memenuhi kewajiban finansial mereka. Apalagi santri yang belum membayar penuh pondok Syahriah tetap diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan pesantren tanpa aktivitas.

Hal ini mencerminkan kepedulian pesantren terhadap keinginan pendidikan dan pengembangan santri, sekaligus menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Oleh karena itu, PPI ASHRI Jember telah berhasil menerapkan prinsip keadilan dalam tata kelola, yang tidak hanya menunjukkan rasa empati, tetapi juga memperkuat hubungan antara pesantren dan para pemangku kepentingan, khususnya wali santri.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Standar Akuntansi Pesantren melalui Penyusunan Laporan Keuangan Di PPI ASHRI

Pelaporan keuangan PPI ASHRI yang disajikan oleh bendahara pesantren dalam pembayaran syahriah pondok disetiap bulannya dan pendapatan dari koperasi yang dimiliki pesantren, akan tetapi yang dicatat hanya pemasukan dan pengeluarannya saja dengan pencatatan tersebut masih belum sesuai dengan pelaporan keuangan yang

berlaku. Oleh sebab itu, dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan, sumber daya yang kurang memadai seperti perangkat lunak (komputer) serta kurangnya pelatihan mengenai standar akuntansi keuangan berdasarkan pedoman akuntansi. Di PPI ASHRI mengenai standar akuntansi keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren sampai sekarang masih belum diterapkan sesuai standar yang berlaku, oleh karena itu, dipesantren diperlukan adanya sumber daya yang sesuai dengan bidang *accounting* untuk pelaporan keuangan pesantren dapat tersusun dan terstruktur sebagaimana mestinya.

Dalam penyusunan laporan keuangan PPI ASHRI masih belum sesuai dengan PAP. Dikarenakan dalam pencatatan keuangannya yang dilakukan oleh bendahara pesantren hanya sekedar pemasukan uang bulanan syahriah pondok, pendapatan koperasi dan pengeluaran biaya operasional pesantren. Pemasukan yang sudah terkumpul kemudian setiap bulannya disetorkan dan dilaporkan kepada ketua majelis pesantren.

Laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan termasuk kedalam PAP. Aset, liabilitas, dan ekuitas itu semua masuk kedalam laporan posisi keuangan. Pembatasan sementara dan pembatasan permanen atas penggunaan aktiva bersih dirinci dalam laporan kegiatan tahunan perusahaan. Laporan arus kas merangkum semua dana yang masuk

dan keluar untuk periode waktu tertentu. Gambaran umum pondok pesantren, kebijakan akuntansi, pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam perspektif Teori Legitimasi, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam perlu memperoleh legitimasi dari masyarakat dan *stakeholder* dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan sesuai standar. Jika laporan keuangan disusun dengan baik sesuai PAP, maka pesantren dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang diterima.

Berdasarkan Teori *Stakeholder* dimana pesantren memiliki berbagai pemangku kepentingan, seperti santri, wali santri, dan pengurus. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang baik dapat menjadi alat akuntabilitas bagi *stakeholder*, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan dana pesantren.

Penelitian Sahri Yulian dan Arraditya Permana juga menemukan bahwa laporan keuangan di PPM Al-Manar hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran tanpa memenuhi komponen laporan keuangan yang lengkap, sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi Pesantren.

Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian di PPI ASHRI Jember pada laporan keuangan PPI ASHRI yang masih menggunakan

pencatatan keuangan sederhana dan belum sesuai dengan PAP, berikut laporan keuangan yang terjadi di PPI ASHRI:

1) Laporan Posisi Keuangan

Dalam laporan posisi keuangan ini memberikan informasi tentang aset, liabilitas, dan asset neto dari yayasan pondok pesantren hingga hubungan antar unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Berikut laporan keuangan posisi keuangan PPI ASHRI

Tabel 4.4
Rekomendasi Laporan Posisi Laporan Keuangan
PPI ASHRI

ASET	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	X
Piutang usaha	X
Persediaan	X
Biaya dibayar dimuka	X
Aset lancar lain	X
Jumlah	XXX
Aset Tidak Lancar	
Investasi pada entitas lain	X
Properti investasi	X
Aset tetap	X
Aset tidak berwujud	X
Aset tidak lancar lain	X
Jumlah	XXX
LIABILITAS	
Liabilitas jangka pendek	
Pendapatan diterima dimuka	X
Utang jangka pendek	X
Liabilitas jangka pendek lain	X
Jumlah	XXX
Liabilitas jangka panjang	
Utang jangka panjang	X
Liabilitas imbalan kerja	X
Liabilitas jangka panjang lain	X
Jumlah	XXX

Total liabilitas	xxx
ASET NETO	
Aset neto tidak terikat	x
Aset neto terikat temporer	x
Aset neto terikat permanen	x
Total Aset Neto	xxx
Total Liabilitas dan Aset Neto	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	x
Piutang usaha	x
Persediaan	x
Biaya dibayar dimuka	x

Sumber: IAI Pedoman Akuntansi Pesantren

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa PPI ASHRI dari segi aset, liabilitas, dan aset neto masih belum dicantumkan dalam pencatatan laporan keuangan pesantren serta tidak memperhatikan pentingnya adanya laporan keuangan pesantren.

2) Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas terdapat laporan yang terkait tentang informasi kinerja pondok pesantren. Oleh karena itu dapat dilihat laporan aktivitas PPI ASHRI sebaga berikut:

Tabel 4.5
Rekomendasi Laporan Aktivitas
PPI ASHRI

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	
Penghasilan tidak terikat	
Kontribusi santri	x
Hibah pendiri dan pengurus	x
Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya	x
Pendapatan lain	x
Jumlah	xxx
Beban Tidak Terikat	

Beban pendidikan	X
Beban konsumsi dan akomodasi	X
Beban umum dan administrasi	X
Jumlah	XXX
Kenaikan (penurunan)	XXX
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER	
Program A	
Pendapatan	X
Beban	(X)
Surplus	X
Aset neto terikat temporer yang berakhir pembatasannya	X
Program B	
Pendapatan	X
Beban	(X)
Surplus	X
Aset neto terikat temporer yang berakhir pembatasannya	X
Kenaikan (penurunan)	XXX
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN	
Wakaf uang	X
Wakaf harta bergerak selain uang	X
Wakaf harta tidak bergerak	X
Hasil bersih pengelolaan dan pengembangan wakaf	X
Alokasi hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf	(X)
Kenaikan (penurunan)	XXX
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	XXX
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	XXX
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	
Penghasilan tidak terikat	
Kontribusi santri	X
Hibah pendiri dan pengurus	X
Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya	X
Pendapatan lain	X
Jumlah	XXX

Sumber: IAI Pedoman Akuntansi Pesantren

Pada tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa PPI ASHRI yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di pesantren. Faktanya pesantren mendapat pemasukan keuangannya diperoleh dari santri yang membayar syahriah pondok setiap bulan serta koperasi kecil pesantren.

3) Laporan Arus kas

Dalam mengetahui informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran kas pada yayasan pondok pesantren terdapat dari laporan arus kas selama periode tertentu. Berikut laporan arus kas PPI ASHRI:

Tabel 4.6
Rekomendasi Laporan Arus Kas
PPI ASHRI

ARUS KAS OPERASI	
Rekonsiliasi perubahan aset neto menjadi kas neto	
Perubahan aset tetap	x
Penyesuaian:	
Penyusunan	x
Kenaikan piutang usaha	x
Kenaikan persediaan	x
Penurunan biaya dibayar dimuka	
Kenaikan pendapatan diterima dimuka	x
Jumlah kas neto diterima dari aktivitas operasi	xxx
ARUS KAS INVESTASI	
Pembelian aset tidak lancer	x
Penjualan investasi	x
Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas investasi	xxx
ARUS KAS PENDANAAN	
Pembayaran utang jangka panjang	x

Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas investasi	xxx
Kenaikan (penurunan)	xxx
Saldo Awal	xxx
ARUS KAS OPERASI	
Rekonsiliasi perubahan aset neto menjadi kas neto	

Sumber: IAI Sumber: IAI Pedoman Akuntansi Pesantren

Pada tabel diatas terlihat dengan nyata bahwa di PPI ASHRI pada arus kas dari setiap operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan masih belum sesuai dengan standar. Pesantren hanya mencatat pemasukan dan pengeluarannya saja hal ini untuk mengetahui laporan keuangan pesantren juga sulit.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan perlu disusun secara sistematis dengan mengikuti urutan yang sesuai dengan komponen utama laporan keuangan, karena merupakan bagian integral yang tidak dapat dikeluarkan dari pengelolaan keuangan tersebut.

Setelah dilihat dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas pada catatan atas laporan keuangan yang dimiliki PPI ASHRI masih belum tersajikan dengan baik dan benar, yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja laporan tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Tujuan utama dari catatan atas laporan keuangan adalah untuk menunjukkan kepatuhan pondok pesantren terhadap Pedoman Akuntansi Pesantren dalam proses penyusunan laporan

keuangannya. Catatan ini memuat kebijakan akuntansi yang diterapkan serta penjelasan terkait pos-pos penting dalam laporan keuangan yang relevan bagi pondok pesantren.

PPI ASHRI menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan laporan keuangan, yang disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya pemahaman pengurus pesantren mengenai standar dan prinsip akuntansi yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, terbatasnya sumber daya yang tersedia, baik dalam hal tenaga profesional di bidang akuntansi maupun perangkat pendukung seperti perangkat lunak akuntansi, yang dapat membantu proses penyusunan laporan keuangan. Ketiga, minimnya pelatihan dan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren membuat pengurus tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar.

Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan yang disusun belum optimal dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar tata kelola keuangan berbasis *good governance*.

2. Menciptakan *Good Governance* melalui Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pesantren

Dari perspektif Teori Agensi, hubungan antara pengurus pesantren (agen) dan masyarakat atau wali santri (prinsipal) dapat menimbulkan asimetri informasi, di mana pengurus memiliki informasi lebih banyak tentang keuangan pesantren masyarakat dibandingkan. Kurangnya transparansi dalam laporan keuangan dapat menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas pesantren. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi pesantren berbasis *Good Governance* menjadi solusi untuk mengurangi masalah agensi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan pesantren.

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Himmatul Ulyah dan Rizki menyoroti bagaimana pedoman akuntansi pesantren dapat berkontribusi pada peningkatan tata kelola pesantren menuju *Good Islamic Boarding School Governance*. Hal ini berkaitan dengan penelitian ini, yang menekankan pentingnya penerapan standar akuntansi yang sesuai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pesantren. Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan keuangan yang lebih sistematis agar pesantren dapat menjalankan prinsip *Good Governance* dengan lebih baik seperti:

a. Transparansi

Transparansi (keterbukaan) berperan penting dalam memastikan setiap aliran dana, baik pemasukan maupun pengeluaran, dilaporkan dengan jelas. Laporan keuangan harus dibuat terbuka untuk semua pemangku kepentingan, termasuk wali santri. Prinsip ini menjamin kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Meski demikian, laporan keuangan mereka saat ini masih sederhana dan belum sepenuhnya memadai dalam mencakup semua aspek keuangan sesuai standar akuntansi pesantren.

Laporan ada di PPI ASHRI mengenai transparansi (keterbukaan) hanya diberikan kepada ketua majelis, wakil ketua majelis, dan bendahara pesantren, sedangkan wali santri selaku *stakeholders* tidak dilibatkan. prinsip transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan di PPI ASHRI Jember masih terbatas dan belum optimal. Keterbukaan laporan keuangan hanya melibatkan pengurus, seperti bendahara, wakil ketua majelis, dan ketua majelis, sementara wali santri selaku *Stakeholders* penting tidak memiliki akses terhadap laporan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan masih bersifat internal dan belum mencakup pihak eksternal, meskipun wali santri turut berkontribusi dalam pembiayaan pesantren.

Dengan minimnya keterbukaan ini dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas, karena kurangnya akses terhadap informasi dapat menimbulkan kesalahpahaman atau menurunkan tingkat kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, transparansi ini juga menjadi hambatan bagi PPI ASHRI dalam mencapai standar tata kelola yang baik (*Good Governance*), mengingat transparansi merupakan salah satu pilar utamanya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab pesantren atas pengelolaan dana yang diterimanya. Pengelola keuangan, seperti bendahara pesantren, menyusun laporan tentang penggunaan dana santri dan hasil usaha pesantren.

Laporan keuangan PPI ASHRI mencakup penerimaan dan pengeluaran, namun belum mampu untuk menunjukkan akuntabilitas secara penuh. pengelolaan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pesantren yang seharusnya mencakup posisi laporan keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. dikarenakan kurangnya pengetahuan dari staf pengelola keuangan. dengan keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan, yang dapat mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan pesantren untuk memenuhi prinsip tata kelola yang baik.

c. Tangung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab (*Responsibility*) dalam konteks *Good Governance* mengacu pada kewajiban suatu organisasi atau lembaga untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, memastikan bahwa semua aktivitas dan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar yang ditetapkan. Selain itu, lembaga juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, termasuk menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan serta menjalankan program-program yang mendukung keinginan sosial dan lingkungan melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Dalam pengelolaan keuangan, tanggung jawab ini diwujudkan dengan memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan organisasi.

Kebijakan tata kelola keuangan di PPI ASHRI belum memiliki aturan formal atau tertulis. Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan keputusan internal yang melibatkan ketua majelis, wakil ketua, dan bendahara, tanpa melibatkan pihak eksternal seperti wali santri. Meski demikian, pengurus pesantren berkomitmen untuk mengelola dana dengan amanah (tanggung jawab) dan memastikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan operasional pesantren. Sementara itu, wali santri tidak terlibat

dalam pengelolaan dana pesantren, tetapi menunjukkan kepercayaan penuh kepada pengurus pesantren dalam penggunaan dana tersebut untuk tujuan yang baik.

d. Kemandirian (*Independensi*)

Kemandirian (*Independensi*) adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsi manajemennya secara mandiri tanpa adanya intervensi atau dominasi dari pihak internal maupun eksternal.

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dan kebijakan pelaksanaan dilakukan berdasarkan aturan, nilai, dan kepentingan organisasi itu sendiri, bukan karena tekanan atau pengaruh pihak lain.

Dalam informasi yang sudah disampaikan diatas PPI ASHRI mengelola keuangannya secara internal, dengan keputusan keuangan yang melibatkan ketua majelis, wakil ketua, dan bendahara. Tidak ada pengaruh dari pihak luar, seperti wali santri (*stakeholders*) atau lembaga pemerintah, dalam pengambilan keputusan strategi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan keuangannya.

Pesantren bergantung pada dana dari santri Syahriah pondok dan hasil usaha pesantren (koperasi) untuk kebutuhan operasionalnya. Namun terbatasnya sumber daya manusia yang

kompeten di bidang akuntansi dan minimal pelatihan menunjukkan tidak adanya tantangan dalam mencapai kemandirian yang optimal, meskipun PPI ASHRI memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam pengelolaan keuangan, keterbatasan dalam penerapan standar akuntansi pesantren dan kurangnya infrastruktur modern menjadi hambatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola.

e. Keadilan (*fairness*)

Keadilan dapat diartikan sebagai prinsip dalam tata kelola keuangan dan operasional pesantren yang bertujuan untuk memberikan perlakuan yang setara dan proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Dalam konteks pesantren, keadilan menjadi landasan untuk menciptakan keharmonisan antara pengurus, santri, wali santri (*stakeholders*), dan masyarakat. PPI ASHRI Jember sangat memperhatikan prinsip keadilan (*fairness*) dalam pengelolaan dan penyediaan fasilitas bagi seluruh santri, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pesantren memberikan pembebasan tanggungan biaya pondok kepada santri yang kurang mampu dan memberikan keringanan pembayaran bagi santri yang menghadapi kesulitan sementara, seperti menunggu hasil panen tani. Meskipun demikian, semua santri, baik yang mampu maupun kurang

mampu, tetap mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk dalam akses terhadap makanan, fasilitas belajar, dan partisipasi dalam kegiatan pondok. Tidak ada diskriminasi terhadap santri yang belum mampu memenuhi kewajiban finansial mereka. Apalagi santri yang belum membayar penuh pondok Syahriah tetap diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan pesantren tanpa aktivitas.

Hal ini mencerminkan kepedulian pesantren terhadap keinginan pendidikan dan pengembangan santri, sekaligus menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Oleh karena itu, PPI ASHRI Jember telah berhasil menerapkan prinsip keadilan dalam tata kelola, yang tidak hanya menunjukkan rasa empati, tetapi juga memperkuat hubungan antara pesantren dan para pemangku kepentingan, khususnya wali santri.

Berdasarkan teori *Good Governance* dan ICG, prinsip-prinsip dalam pembahasan ini dapat dibandingkan sebagai berikut:

Tabel 4.7

Perbandingan Prinsip *Good Governance* dan *Islamic Corporate Governance*

Prinsip	<i>Good Governance</i>	<i>Islamic Corporate Governance</i>
Transparansi	Mengutamakan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan pesantren	Mengaku pada prinsip shiddiq (kejujuran), di mana informasi keuangan harus disampaikan secara jujur dan

	agar dapat diakses oleh pemangku kepentingan.	tidak ada manipulasi data.
Akuntabilitas	Setiap pengurus pesantren bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan seperti santri, wali santri, donatur, dan masyarakat.	Berdasarkan prinsip amanah , pengurus harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan syariat Islam.
Tanggungjawab	Pengelola pesantren wajib menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku.	Berdasarkan prinsip tabligh Kemampuan menyampaikan kebenaran dengan jujur, transparan, dan bijaksana dalam setiap keputusan dan komunikasi.
Kemandirian	Kemampuan pesantren untuk mengelola keuangan, sumber daya, dan pengambilan keputusan tanpa ketergantungan pada pihak luar.	Berdasarkan prinsip fathanah Kecerdasan dalam berpikir, mengambil keputusan, dan mengelola pesantren secara strategis berdasarkan prinsip Islam.
Keadilan	Setiap pemangku kepentingan mendapat perlakuan yang adil dalam hal kebijakan, keuangan, dan keputusan pesantren	Prinsip berlandaskan “ adl ” (keadilan), di mana semua keputusan harus didasarkan pada nilai-nilai Islam dan menghindari ketidakadilan dalam pengelolaan pesantren.

Sumber: diolah peneliti (2025)

Good Governance dan ICG memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan tata kelola pesantren yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Good Governance fokus pada kepatuhan terhadap regulasi hukum dan standar tata kelola modern, sedangkan ICG berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti, *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fathanah*, dan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pesantren dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan melalui penerapan standar yang telah ditetapkan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik, pesantren dapat lebih profesional dalam tata kelola keuangannya serta meningkatkan kepercayaan dari *stakeholder*, termasuk santri, wali santri, dan masyarakat. Dari temuan penelitian ini, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pesantren melalui penyusunan laporan keuangan di PPI ASHRI

Penerapan Standar Akuntansi Pesantren di PPI ASHRI masih terbilang belum sesuai dengan standar yang berlaku, dikarenakan minimnya pengetahuan dan kurangnya sumber daya serta pelatihan mengenai standar akuntansi. Maka dari itu diperlukan pelatihan tentang standar akuntansi yang lebih luas pada pesantren tersebut.

2. Menciptakan *Good Governance* melalui Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pesantren

a. Transparansi

Dalam pelaporan atau penyusunan keuangan di PPI ASHRI ini terbilang masih belum transparan, karena laporan keuangannya hanya diketahui oleh pihak internal seperti, ketua majelis, wakil ketua majelis, dan bendahara pesantren tanpa melibatkan wali santri selaku *Stakeholders*.

b. Akuntabilitas

Pelaporan keuangan PPI ASHRI mencakup penerimaan dan pengeluaran, namun belum mampu untuk menunjukkan akuntabilitas secara penuh. pengelolaan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pesantren

c. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Dalam kebijakan tata kelola keuangan di PPI ASHRI belum memiliki aturan formal atau tertulis. Meski demikian, pengurus pesantren berkomitmen untuk mengelola dana dengan amanah (tanggung jawab) dan memastikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan operasional pesantren.

d. Kemandirian (*Independensi*)

PPI ASHRI memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam pengelolaan keuangan, karena pengelolaan keuangannya hanya

melibatkan ketua majelis, wakil ketua majelis, dan bendahara pesantren.

e. Keadilan (*Fairness*)

PPI ASHRI sangat memperhatikan prinsip keadilan (*fairness*) dalam pengelolaan dan penyediaan fasilitas bagi seluruh santri, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pesantren memberikan pembebasan tanggungan biaya pondok kepada santri yang kurang mampu dan memberikan keringanan pembayaran bagi santri yang menghadapi kesulitan sementara, seperti menunggu hasil panen tani.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa saran antara lain:

- 1) Bagi pondok pesantren keberadaan sumber daya yang memadai, seperti perangkat lunak (komputer), sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pelatihan mengenai standar akuntansi pesantren juga diperlukan untuk memastikan laporan keuangan tersusun secara sistematis. Dengan menerapkan prinsip *good governance*, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan, sehingga pengelolaan keuangan pesantren menjadi lebih terstruktur dan terbuka.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk peneliti selanjutnya melanjutkan penelitian dengan metode yang berbeda terdapat guna

mengetahui mengapa sampai saat ini masih banyak pesantren-pesantren yang belum menerapkan keuangannya secara benar dan menciptakan tata kelola yang baik. Serta dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan penelitian ini, agar penelitian yang telah dilakukan bisa lebih baik lagi dari penelitian yang dilakukan saat ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Aihunan. "Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) di Yayasan Pondok Pesantren Islam Al-Anshor Ambon". Disertasi Doktor, IAIN Ambon, 2020.
- Badjuri, A., Jaeni, J., & Kartika, A. "Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia". 28(1). (2021).
- Chysara, DI, & Nugraha, MS Efektivitas Pengelolaan Keuangan Melalui Penerapan Good Governance Di Pondok Pesantren . *Epistemik*, 3(1). (2024).
- Donaldson, T., & Preston, LE Teori Pemangku Kepentingan Perusahaan: Konsep, Bukti, dan Implikasi. *Tinjauan Akademi Manajemen*, (1995).
- Eisenhardt, KM Teori Agensi: Penilaian dan Tinjauan . *Tinjauan Akademi Manajemen*, (1989).
- Endraswati, Hikmah. "Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6.2 (2015): 89-108.
- Fahresza, Y. "Analisis Penerapan Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Al-Hikmah Pulau (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hikah Pulau)". Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Faozan, A. "Pondok Pesantren Dan Pemberdayaan Ekonomi". (Ibda), (1). (2006).
- Faturahman, F. "Peningkatan Daya Saing Pesantren; Kontribusi Good Corporate Governance Dan Informasi Akuntansi Melalui Kinerja Organisasi Pesantren Di Kota Jambi". *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(1). (2024).
- Febrianty, RF. "Pengaruh Board Diversity Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". Disertasi Doktor Universitas Airlangga, (2020).
- Fitri, SA, Nabilla, SF, Karim, RA, Nasution, R., Ayunda, T., & Sari, E. "Pentingnya Penerapan Akuntansi Ponpes: Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pariangan". *Jurnal Akuntansi Ummi*, 3(2). (2023).
- Fitriani, L. "Pendidikan Peace Building Di Pesantren: Sebuah Upaya Mencegah Radikalisasi". *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 16(1). (2015).

- Freeman, RE *Manajemen Strategis: Pendekatan Pemangku Kepentingan*. Boston: Pitman, 1984.
- Fuadah, N., & Hakimi, F. "Kinerja Keuangan Dan Pangsa Pasar Pada Bank Umum Syariah Devisa Indonesia: Perspektif Teori Stakeholder." *Jurnal Penelitian Ipteks* , 5(2), 2020.
- George H. Bodnar dan William S. Hopwood. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Ghozali dan Chariri. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Hadi. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Graha Ilmu, 2011.
- Harahap, S. S. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Grafindo Persada. (2015).
- Hidayatullah, M. F. dkk. "Strategi Digital Marketing dengan Instagram dan TikTok Pada Butik DOT. id." *Human Falah* 10.1 (2023)
- Huzila, Z. "Adopsi Good Governance Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa". Disertasi Doktor, Universitas Wiraraja, 2019.
- IAI dan Bank Indonesia. Halaman 3–5, 11.
- Ibnudin Ichsan. *Pengantar Akuntansi 1*. Edisi ke-1. Palu, 2021.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Pedoman Akuntansi Pesantren* . Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2018.
- Jensen, MC, & Meckling, WH "Teori Perusahaan: Perilaku Manajerial, Biaya Agensi dan Struktur Kepemilikan." *Jurnal Ekonomi Keuangan* , 3(4), 305–360, 1976.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Khayati, SQ "Transparansi Keuangan Berbasis Good Governance Di Pondok Pesantren Al Multazam Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* , 3(2), 2023.
- Moenek, Reydonnyzar, M.Devt. M, dan Suwanda. *Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung, 2019.
- Mukhtaruddin, M. Ubaidillah, et al. "Good corporate governance, corporate social responsibility, firm value, and financial performance as moderating variable." *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management* 3.1 (2019)

- Napier, C. *Defining Islamic Accounting: Current Issues, Past Roots. Accounting History*, 14(1–2). (2009).
- Nasution, M. *Siklus Akuntansi*. Universitas Sumatera Utara. (2004).
- Nugraha, Sophia Laila, and Hikmah Endraswati. "Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren." *I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance* 8.2 (2022): 119-136.
- Obid, SNS, & Naysary, B. Menuju kerangka teoritis yang komprehensif untuk tata kelola Syariah di lembaga keuangan Islam. *Jurnal Pemasaran Jasa Keuangan*, 19 (4), (2014). 304-318.
- Parmono, Agung, dan Aminatus Zahriyah. "Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember." *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 6.2 (2021)
- Perdana, & Minanurohman, A. Tunnelling Behavior: Exploring Corporate Governance and Ownership Structure. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1). (2024).
- Pesantren - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. (Accessed 18 January 2022).
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember." *Karsa Journal of Social and Islamic Culture* 22.2 (2014)
- Rini, Nova. "The implementation of islamic corporate governance (ICG) on sharia banking in Indonesia." *International Journal of Applied Business* 2.1 (2018): 29-38.
- Ross, S. A. *Teori Ekonomi Agensi: Masalah Prinsipal*. The American Economic Review, 63(2), (1973).
- Rudianto. *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga. (2012).
- Rusmianto, R., & Maulini, R. M. R. "Desain Sistem Informasi Akuntansi Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren". *Jutis (Jurnal Teknik Informatika)*, 11(1). (2023).
- Safitri, R. N., & Narasti, M. "Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai ISAK 35 pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya". *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(2). (2023).

- Sahri, Y. "Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren Menggunakan PSAK No. 45". *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), (2021).
- Santi, N. "Analisis Pelaporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren". Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Sari, E. N., Putri, N. A., RR, M. A. F., & Nisa, I. R. "Penerapan SAK ETAP dalam Pencatatan Laporan Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember". *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 5(2), 72-80. (2024).
- Sodiq, Ahmad. "Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung", no. 2 (November 2017).
- Soleha, N., Yulianto, A. S., Rosiana, R., & Hasanudin, A. I. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(4). (2022).
- Suaidah, Y. M., & Rohmatillah, E. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Lembaga Pendidikan Pesantren". *Senmakombis: Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Dewantara*, 6(1). (2022).
- Suchman, M. C. *Mengelola Legitimasi: Pendekatan Strategis dan Kelembagaan. Dalam Tinjauan Manajemen 20.*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2017), 300.
- Suryadi, N. dkk. "Analisis Penerapan Akuntansi Pesantren Berdasarkan ISAK 35 pada Pondok Pesantren Modern I'aaanath Thalibiin Perawang". *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), (2023).
- Syukri, M., Fitri, S. M., & Syafhariawan, H. "Analisis Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Al-Muthmainnah Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren". *Jurnal Economina*, 2(1), (2023).
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. (2019).
- Tim Penyusun Buku Pedoman UIN Khas Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. (2021).

- Ulyah, H., & Rizki, R. "Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Menuju Good Islamic Boarding School Governance". *Indonesian Journal of Dedication and Educations*, 2(2). (2023).
- Windasari, I. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam". *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1). (2024).
- Yohani, Y. "Implementasi Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pondok Pesantren". *Neraca*, 15(2). (2019).
- Yuniharto, J. D. A. dkk. "Determinan Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Sektor Industri: Sudut Pandang Teori Stakeholder". *Akuntansi Dewantara*, 8(1). (2024).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Penerapan Standar Akuntansi Pesantren Berbasis <i>Good Governance</i> di PPI ASHRI Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi Pesantren 2. <i>Good Governance</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Posisi keuangan 2) Laporan Aktivitas 3) Laporan Arus Kas 4) Catatan Atas Laporan Keuangan <ol style="list-style-type: none"> a. Transparansi b. Akuntabilitas c. Tanggung Jawab d. Kemandirian e. Keadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Majelis Pesantren b. Wakil Ketua Majelis c. Bendahara Pesantren d. Wali Santri e. Santri 2. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif 2. Lokasi penelitian di PPI ASHRI Jember 3. Metode Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. dokumentasi 4. Keabsahan Data menggunakan triangulasi sumber. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana Pondok Pesantren Menciptakan <i>Good Governance</i> Melalui Laporan Keuangan Yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pesantren?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriyani Agustin

NIM : 211105020003

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiat dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 17 Desember 2024
yang menyatakan

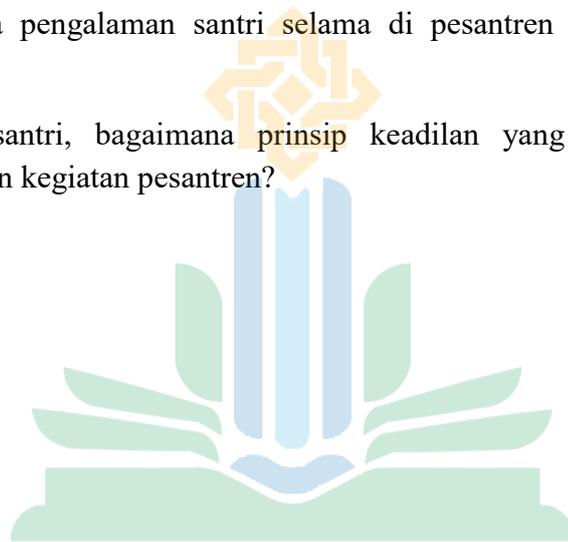


Fitriyani Agustin
NIM. 211105020003

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem akuntansi yang diterapkan di PPI Ashri Jember? Apakah sudah mengikuti standar akuntansi pesantren yang ada?
2. Bagaimana apa proses pencatatan dan pelaporan keuangan di pesantren ini? Apa saja komponen yang paling sering dilaporkan?
3. Dari mana saja pemasukan PPI ASHRI ini?
4. Bagaimana jika ada santri yang tidak melakukan pembayaran setiap bulannya?
5. Apakah pondok pesantren ini memiliki usaha?
6. Tantangan terbesar apa yang hadapi dalam mengelola keuangan pesantren?
7. Bagaimana memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun akurat dan transparan?
8. Bagaimana prinsip *good governance* (tata kelola yang baik) dalam pengelolaan keuangan di PPI Ashri Jember?
9. Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana dan alokasi sumber daya di pesantren (SPP santri)?
10. Bagaimana Anda menilai transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (amanah/ tanggung jawab) dalam pengelolaan dana di pesantren?
11. Bagaimana pesantren pernah menghadapi situasi sulit terkait pengelolaan dana?
12. Bagaimana keterlibatan pengurus pesantren dalam penerapan prinsip *good governance* terkait pengelolaan sumber daya?
13. Bagaimana kebijakan formal yang diterapkan di pesantren ini untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik?
14. Bagaimana Anda menilai tingkat kepatuhan pesantren terhadap prinsip-prinsip *good governance*?
15. Bagaimana upaya pesantren dalam mewujudkan keadilan bagi semua santri?
16. langkah apa yang diambil jika ditemukan penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap tata kelola keuangan?

17. Bagaimana dalam setiap pengambilan keputusan di pesantren apakah ada campur tangan dari wali santri?
18. Sebagai wali santri, bagaimana tampilan Anda mengenai transparansi keuangan di PPI Ashri Jember?
19. Bagaimana kepercayaan wali santri terhadap sistem pengelolaan dana pesantren ini?
20. Apakah pesantren memberikan hak kepada wali santri untuk memberikan masukan dan saran?
21. Bagaimana pengalaman santri selama di pesantren terkait pengelolaan keuangan?
22. Menurut santri, bagaimana prinsip keadilan yang diterapkan dalam fasilitas dan kegiatan pesantren?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1541/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024 25 November 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pondok Pesantren Islam Ash-Shiddiqi Puteri Jember
Jl. KH Shiddiq, Kelurahan Jember Kidul, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten
Jember, Jawa Timur 68131

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas
Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan
mahasiswa berikut :

Nama : Fitriyani Agustin
NIM : 211105030003
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Penerapan Standar Akuntansi
Pesantren Berbasis *Good Governance* di PPI ASHRI Jember" di lingkungan/lembaga
wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Nuril Wahyuni Rahayu





الْمَدْرَسَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْاَشْرِيَّةُ الْجَمْبَرِيَّةُ

PONDOK PESANTREN ISLAM ASH-SHIDDIQI PUTERI

PPI "ASHRI"

JEMBER - JAWA TIMUR

Alamat : Jalan K.H. M. Shiddiq No. 82 Telp. 0331 - 421210 JEMBER

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ustadzah Ro'ufah Umar

NIP : -

Jabatan : Ketua Majelis Pesantren PPI ASHRI

Menerangkan sebenarnya bahwa:

Nama : Fitriyani Agustin

NIM : 211105030003

Jurusan : Akuntansi Syariah

Mahasiswa : UIN KHAS JEMBER

Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian skripsi di Pondok Pesantren Islam Ash-Shiddiqi Puteri, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada tanggal 31 Oktober sampai 03 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYIDDIQ
JEMBER

Jember, 03 Desember 2024

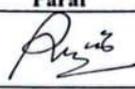
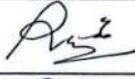
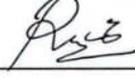
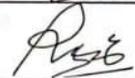
Ketua Majelis Pesantren

PPI ASHRI

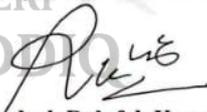


Ustadzah Ro'ufah Umar

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1	31 Oktober	Observasi tempat penelitian di PPI ASHRI kepada Ustadzah Ro'ufah Umar selaku Ketua Majelis Pesantren.	
2	25 November	Penyerahan surat izin penelitian kepada Ustadzah Ro'ufah Umar selaku Ketua Majelis Pesantren.	
3	26 November	Wawancara dengan Ustadzah Ro'ufah Umar selaku Ketua Majelis Pesantren.	
4	28 November	Wawancara dengan Miftahul Hasanah selaku Wakil Ketua Majelis.	
5	29 November	Wawancara dengan Siti Fatimah Rahmatullah Amini selaku bendahara Pesantren.	
6	01 Desember	Wawancara dengan Nilna Syarafah dan Siti Masruroh selaku santri di PPI ASHRI.	
7	02 Desember	Wawancara dengan ibu Nur Jannah selaku wali santri atau donatur PPI ASHRI.	
8	03 Desember	Dokumentasi.	
9	03 Desember	Penerimaan Surat Keterangan Selesai Penelitian.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 03 Desember 2024

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQI
J E M B E R

Ustadzah Ro'ufah Umar
Ketua Majelis Pesantren

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ketua majelis PPI ASHRI (Ustadzah Ro'ufah Umar)



Wawancara dengan wakil ketua majelis PPI ASHRI (Miftahul Hasanah)



Wawancara dengan bendahara PPI ASHRI (Siti Fatimah Rahmatullah)



Wawancara dengan Wali Santri (*Stakeholders*) di PPI ASHRI



Wawancara dengan santri PPI ASHRI (Nilna Syarofa dan siti Masruroh)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fitriyani Agustin
NIM : 211105030003
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Penerapan Standar Akuntansi Pesantren Berbasis Good Governance di PPI ASHRI Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Desember 2024
Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Luluk Musfirah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



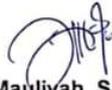
SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fitriyani Agustin
NIM : 211105020003
Semester : Tujuh (VII)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember,
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,


Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fitriyani Agustin
NIM : 211105030003
Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Blodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
Pembimbing

Agung Parmono, S.E., M.Si
NIP. 197512162009121002



BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Fitriyani Agustin
NIM : 211105030003
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 Agustus 2003
Alamat : Dusun Krajan RT 001/ RW 005
: Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten
: Jember
Agama : Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Hp : +6285235063883
Email : fitriagustin999yahoo@gmail.com

Pendidikan

TK : Al Hikmah Pakusari
SD : SDN Pakusari 01
MTs : MTs ASHRI Jember
MA : MA ASHRI Jember
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
: Siddiq Jember